

DATANG, MENANAM, DAN BERTAHAN

Potret Masyarakat Desa Sumber Sari dan Merangan,
Kalimantan Timur yang Bertahan di Tengah Bujuk
Rayu Ekonomi Pertambangan





Penyusun:

Diah Pitaloka
Fhierly Shaqirah
Mustari Sihombing
Windy Pranata

Penata Letak & Sampul:

Docallisme Studio

Ucapan terima kasih atas bantuan selama proses penyusunan dan penyuntingan kepada Siti Maimunah, Merah Johansyah, dan Pengurus JATAM Kaltim.

Daftar Singkatan

ADWI	: Anugerah Desa Wisata Indonesia
AMDAL	: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
BIMAS	: Bimbingan Massal
BINMAS	: Bimbingan Masyarakat
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
Calin	: Calon Indukan
CV	: <i>Commanditaire Vennootschap</i> (Perseroan Komanditer)
DI/TII	: Darul Islam / Tentara Islam Indonesia
Ditjen	: Direktorat Jenderal
DPRD	: Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah
Ekral	: (Krama-ngoko) Mengacu pada penjelasan atau keterangan tentang suatu peristiwa atau hal.
IPB	: Institut Pertanian Bogor
IR64	: <i>Improve Rice 64</i>
IRRI	: <i>International Rice Research Institute</i>
JATAM Kaltim	: Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur
KK	: Kepala Keluarga
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
Kukar	: Kutai Kartanegara
KWT	: Kelompok Wanita Tani
MABES POLRI	: Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia
OBM	: <i>Oost Borneo Maatschappij</i>
ORBA	: Orde Baru
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
PDAM	: Perusahaan Daerah Air Minum
PHK	: Pemutusan Hubungan Kerja
Pokdarwis	: Kelompok Sadar Wisata
POLRES	: Kepolisian Resort
PT BMS	: Perseroan Terbatas Borneo Mitra Sejahtera
Pupuk NPK	: Nitrogen, Phosphorus, dan Kalium
RDP	: Rapat Dengar Pendapat

RT	: Rukun Tetangga
SK Pertanian	: Surat Keputusan Pertanian
SK Wisata	: Surat Keputusan Wisata
SP2HP	: Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara
USAID	: <i>U.S. Agency for International Development</i>

Daftar Gambar

- Gambar 1 Foto Ismail Bolong. Sumber Foto: <https://news.detik.com/berita/d-6470026/bareskrim-limpahkan-berkas-perkara-tambang-illegal-ismail-bolong-ke-kejaung>
- Gambar 2 Darimin (54 Tahun), Warga Rt 02, Desa Sumber Sari.
- Gambar 3 Foto Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari Mengenakan Rompi Oranye sebagai Tersangka Kasus Korupsi SDA Tahun 2017, Oleh KPK. Sumber Foto: [KPK Resmi Tahan Bupati Kukar Rita Widyasari \(Rappler.Com\)](https://www.rappler.com/news/timor-leste/2017/08/08/kpk-resmi-tahan-bupati-kukar-rita-widyasari/).
- Gambar 4 Foto Kaltim Penuh Lubang Tambang (Lubang Tambang di Balik Jalan Tol Samarinda - Balikpapan).
- Gambar 5 Petani Sayur di Desa Sumber Sari.
- Gambar 6 Pemandangan Ekowisata Desa Sumber Sari, Gabungan Lahan Pertanian dan Bentang Bukit Biru.
- Gambar 7 Wisata Cagar Budaya Jalur Terowongan Transportasi Tambang Batu Bara Oost-Borneo Maatschappij, RT 4 Desa Sumber Sari.
- Gambar 8 Wisata Cagar Budaya Jalur Terowongan Transportasi Tambang Batu Bara Oost-Borneo Maatschappij, RT 4 Desa Sumber Sari.
- Gambar 9 Bagan Empat Model Pembentukan Masyarakat Desa Sumber Sari. Diolah Oleh Tim Penyusun.
- Gambar 10 Potret Pintu Masuk dari Terowongan Atau Lobang V Loa Kulu, Kutai Kartanegara 1948. Sumber: ([Https:Www.Sjilvends.Nl/506gelis.Html](https://www.sjilvends.nl/506gelis.html)).
- Gambar 11 Sibo (81 Tahun) Menunjukkan Gergaji Raksasa Miliknya.
- Gambar 12 Foto Suparmin Warga Dusun Taman Arum Desa Sumber Sari.
- Gambar 13 Hidangan, Sesajen dan Berkat dalam Kegiatan Bersih Desa, Taman Arum, Desa Sumber Sari, 2023.
- Gambar 14 Perempuan dan Ibu-ibu Mempersiapkan Makanan dan Bahan Utama Upacara Bersih Desa di Dapur Warga, 2023.
- Gambar 15 Data Tabel Jenis Dan Hasil Tanaman Pangan, Desa Sumber Sari, 2023.
- Gambar 16 Foto Buruh Tani, Umi, dan Winarti.
- Gambar 17 Foto *Green House*.
- Gambar 18 Foto *Green House*.
- Gambar 19 Foto *Homestay* Milik Parmi.
- Gambar 20 Petambak Ikan, Ardiansyah.

- Gambar 21 Foto Sungai Pelai.
- Gambar 22 Foto Kekeringan Sungai dan Waduk.
- Gambar 23 Foto Kekeringan Sungai dan Waduk.
- Gambar 24 Proses Pembuatan Kolang-kaling.
- Gambar 25 Proses Pembuatan Kolang-kaling.
- Gambar 26 Peta Tambang PT BMS yang Mengkapling Wilayah Penting dan Produktif Warga.
- Gambar 27 Lokasi Tambang Ilegal di Hulu Sungai Pelai dengan Limbah Mengalir Langsung ke Tubuh Sungai.
- Gambar 28 Foto Udara Aktivitas Tambang Ilegal di Desa Sumber Sari.
- Gambar 29 Foto Hulu Sungai Pelai dengan Debit Air yang Semakin Mengecil dan Keruh.
- Gambar 30 Foto Udara Lokasi Penumpukan Batu Bara Ilegal di Kecamatan Loa Kulu Kota.
- Gambar 31 Peta Hauling Tambang Ilegal dari Lokasi Keruk Hingga Jetty Penumpukan Batu bara.
- Gambar 32 Pickup L300 yang Digunakan untuk Memuat Batu Bara Menuju Lokasi Penumpukan.
- Gambar 33 Pickup L300 yang Digunakan untuk Memuat Batu Bara Menuju Lokasi Penumpukan.
- Gambar 34 Alat Berat Mulai Memasuki Sumber Sari dan Merusak Lahan Warga.
- Gambar 35 Foto Surat Tugas Khusus PT BMS NO 038/SEK-KD/KK/IV/2012.
- Gambar 36 Foto Rita Widyasari Bersama Kepala Desa Sumber Sari Soekarno Saat Mengunjungi Desa, Agustus 2014.
- Gambar 37 Foto Aksi Warga Desa Sumber Sari pada Tahun 2011 Saat Menghadang Alat Berat Milik Perusahaan PT. BMS Mencoba Memasuki Desa.
- Gambar 38 Foto Suasana Jaga Malam Warga Merangan Menghadang Hauling Tambang Ilegal di “Mabes”, Sebutan Bagi Posko Portal Warga.
- Gambar 39 Foto Salah Satu Akses Jalan Hauling Tambang Ilegal Menuju Jalan Umum Lokasi Lobang Batu Loh Sumber.
- Gambar 40 Foto Berita Acara Kesepakatan Menolak Hauling.
- Gambar 41 Foto Jumini, Salah Satu Ibu-ibu yang Ikut Menghadang Truk Batu bara.
- Gambar 42 Aksi Warga Menggeruduk Lokasi Tambang Ilegal di Hulu Sungai *Pelai* Desa Sumber Sari, Agustus 2022.

- Gambar 43 Bareskrim Amankan Belasan Tambang Batu bara Ilegal di Loa Kulu. Sumber: Mongabay.
- Gambar 44 Audiensi Jatim, Warga Sumber Sari Bersama Pj Gubernur Kaltim, Melaporkan Ancaman Tambang Batu bara Ilegal dan Desakan Pencabutan IUP PT. BMS.
- Gambar 45 Kebakaran lahan di wilayah wisata bukit biru akibat api dari wisatawan yang berkunjung, Oktober 2014.

Daftar Isi

Daftar Singkatan	iv
Daftar Gambar	vi
Daftar Isi	ix
Ringkasan Eksekutif	xi
1. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Alur dan Metode Penulisan	5
1.3 Pertanyaan Kunci	6
2. Pengaruh Kebijakan dari Masa ke Masa di Desa Sumber Sari	8
2.1 Era Revolusi Hijau Orde Baru dan Dampaknya	8
2.2 Era Otonomi Daerah dan Obral Izin Tambang	11
2.3 Melawan Tambang Melalui Predikat Lumbung Pangan	15
2.4 Bersiasat lewat Status Desa Wisata	17
3. Pembentukan Masyarakat Sumber Sari: Sejarah dan Migrasi	21
3.1 Asal Usul dan Sejarah Awal Pemekaran Desa	21
3.2 Empat Model Pembentukan Masyarakat Sumber Sari	22
3.3 Pengetahuan dan Kearifan Lokal Menyejarah di Sumber Sari	29
4. Transformasi dan Model-model Ekonomi Desa Sumber Sari	34
4.1 Sejarah Kepemilikan Tanah, Ekonomi Pertanian hingga Kolam Tambak	34
4.2 Ekonomi Musiman, Kolang-kaling, dan Kijing	43
4.3 Disrupsi Ekonomi Pertambangan	45
5. Dinamika Perlawanan Masyarakat dan Perempuan Sumber Sari	53
5.1 Membendung Lewat Pilkades dan RT	53
5.2 Aksi-aksi Protes dan Perlawanan Perempuan dari Sumber Sari hingga Merangan	54
5.3 Pelaporan Hukum hingga Menggalang Petisi Tanda-Tangan Penolakan	60
5.4 Perempuan Melawan, Jadi “Intel” Sampai Turun ke Jalan Desa	63
5.5 Pelaporan Hukum hingga Menggalang Petisi Penolakan	64

6. Tantangan dan Alternatif yang Berkeadilan dan Berdaya Pulih	70
6.1 Tantangan Dampak Kesehatan Pertanian intensif	70
6.2 Tantangan Dampak Ekonomi Wisata Massal	73
6.3 Desakan untuk Pemerintah: Menuju Desa Berkeadilan dan Berdaya Pulih	76
Daftar Wawancara dan Lampiran	79
Daftar Rujukan dan Pustaka	80
Tentang Penyusun dan JATAM Kaltim	85

Ringkasan Eksekutif

Desa Sumber Sari dan Dusun Merangan yang berada di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur dikenal luas sebagai lumbung pangan Kutai Kartanegara. Sebanyak 80% masyarakatnya berprofesi sebagai petani, dan hasil sayur-mayurnya mengalir hingga ke pasar-pasar utama di Ibu Kota Samarinda. Selain itu, kedua desa ini juga disematkan sebagai tujuan ekowisata karena keberadaan bukit biru dan eksistensi ekonomi perikanannya.

Namun, berlangsungnya ekonomi pertanian dan perikanan kini terdisrupsi oleh masuknya model ekonomi pertambangan batu bara yang didesak dari luar desa Sumber Sari, baik yang legal maupun yang ilegal. Salah satu perusahaan resmi yang kini mengancam adalah PT. Borneo Mitra Sejahtera (PT BMS) yang memiliki konsesi seluas 3.411 hektar. Penambangan perusahaan tersebut mengintai Kelurahan Bukit Biru, Kelurahan Jahab, dan Desa Sumber Sari, yang berakhir pada 2030 dan akan mewariskan 31 lubang bekas galian tambang. Sementara ekonomi perikanan yang terancam adalah produksi budidaya ikan yang selama ini juga menjadi tulang punggung bagi ekonomi masyarakat setempat.

Selain itu, model ekonomi yang akan punah juga adalah ekonomi wisata Puncak Bukit biru, salah satu dari 7 kawasan wisata andalan di Kutai Kartanegara. Pendapatan dari wisata akan lenyap jika tambang beroperasi. Setidaknya ada 9 *homestay* yang akan kehilangan pemasukan. Tidak hanya itu, aktivitas tambang juga mengancam objek wisata lain seperti Air Terjun, Embung, dan Wisata sejarah terowongan kereta batu bara zaman Belanda.

Selain mengancam beberapa objek wisata, tambang batu bara juga mengancam kearifan lokal yang sudah terbentuk. Salah satu kearifan lokal yang menyebar seperti sedekah bumi dan berbagai keterampilan yang menjadi penanda relasi antara manusia dan alam di sekitar Sumber Sari. Selain itu, penambangan batu bara juga mengancam hilangnya ingatan sosial melalui sejarah pembentukan dan asimilasi kebudayaan pada tahun 1970-an antara masyarakat yang datang dari Blitar, Malang, dan Tulungagung dengan masyarakat Dayak Benuaq dan Kutai bahkan dari Enrekang, Sulawesi Selatan. Semua komunitas masyarakat tersebut memiliki cita-cita yang sama untuk membangun kehidupan baru di Sumber Sari.

Namun, tujuan bersama yang dicita-citakan tersebut kini diganggu dengan beragam cara. Ada beberapa modus operandi yang dilakukan oleh komplotan penambang ilegal agar aktivitas mereka bisa berjalan dengan mulus. Dari menjanjikan uang *fee* debu, pekerjaan, hingga perbaikan jalan yang mereka janjikan kepada warga. Bahkan, politik pecah belah pun tak segan mereka lakukan agar tujuan mereka tetap tercapai.

Warga desa Sumber Sari dan Merangan memilih untuk mempertahankan ekonomi pertanian dan pariwisata. Mereka berupaya membendung lewat pemilihan kepala desa dan RT, mereka hanya mendukung pemimpin yang tegas menolak tambang. Warga juga mengupayakan melalui aksi protes dan perlawanan perempuan dari Sumber Sari hingga membangun posko tolak tambang dan blokade jalan kendaraan pengangkut batu bara di Dusun Merangan.

Pelaporan Hukum hingga menggalang petisi tanda-tangan penolakan juga dilakukan oleh warga. Mereka juga bertemu dan melaporkan aktivitas pertambangan itu kepada PJ Gubernur Kaltim pada Juni 2024, menyerahkan petisi, dan mendesak pencabutan izin PT BMS serta pemberantasan aktivitas tambang ilegal. Tidak hanya laki-laki, kelompok perempuan di Sumber Sari dan Merangan ikut juga aksi-aksi protes menghadang truk-truk batu bara hingga menjadi sumber informan (intel warga tolak tambang).

Celaknya, selain ancaman yang datang dari pertambangan batu bara, ancaman yang tidak terlihat sudah lama datang dari Negara. Pertanian intensif yang melibatkan pupuk dan obat-obatan kimia yang diperkenalkan oleh rezim pertanian saat Orde Baru melalui program Revolusi Hijau juga menyimpan masalah dan bom waktunya sendiri. Mulai dari ketergantungan pada pupuk kimia, yaitu pemakaian pestisida berlebihan hingga dampaknya yang berbahaya dalam jangka panjang untuk kesehatan lingkungan melalui ancaman terhadap kondisi kesehatan tanah dan kesehatan air.

Tak hanya di urusan pertanian, tantangan ekonomi wisata massal juga tidak kalah besarnya. Model pariwisata massal seperti ini cenderung melibatkan banyak orang, dikunjungi oleh ratusan pengunjung, dilakukan secara bersama-sama dalam suatu waktu dan beramai-ramai. Di antara dampak negatifnya adalah lenyapnya budaya lokal atau budaya setempat. Seiring semakin banyaknya pengunjung wisata yang berbondong-bondong ke suatu destinasi, budaya lokal dapat menjadi homogen, penurunan bisnis lokal, hilangnya keragaman ekonomi, kelangkaan lahan untuk hunian hingga harga tanah yang mahal.

Jelas ekonomi tambang bukanlah pilihan, maka tugas bersama selanjutnya adalah merumuskan model ekonomi pertanian dan ekowisata yang sungguh-sungguh lepas dari berbagai jebakan negara yang kapitalistik demi masa depan Desa Sumber Sari kelak.

Laporan ini pada akhirnya juga mendesak Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya menindaklanjuti hasil temuan ini dengan menyusun rencana perlindungan, pengelolaan, pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan mutu air dan pencemaran air sungai *Pelai* akibat aktivitas pertambangan batu bara-bara ilegal. Selain itu, serta mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM selaku pemberi izin, untuk mencabut Izin PT BMS.



1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah yang menjadi korban operasi pertambangan batu bara ilegal di Indonesia. Catatan JATAM Kaltim menyebutkan terdapat sekitar 168 titik bahkan lebih, sebaran aktivitas ilegal di semua kabupaten di provinsi Kalimantan Timur. Yang terbaru adalah pelaporan JATAM Kaltim bersama warga Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu. Meskipun aktivitasnya sempat terhenti ketika dilaporkan, tetapi mereka tetap melakukan penambangan kembali.

Isu tambang ilegal juga mencuat saat muncul video viral dan menghangat sekitar 2022 hingga 2023 dan jelang Pemilu 2024 yang melibatkan mafia di tubuh Kepolisian, Ismail Bolong, adalah salah satu perwira kepolisian yang namanya mencuat kala itu. Penelusuran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menduga terdapat sejumlah dana yang mengalir ke pihak oknum petinggi Polri tersebut untuk mengamankan aktivitas pertambangan ilegal tersebut.

Beredarnya video itu memaksa pemerintah harus merespons tindakan penambangan ilegal yang semakin marak terjadi¹. Berdasarkan laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada awal 2023 lalu juga menyebutkan terdapat 2.741 lokasi pertambangan tanpa izin yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia².

Khusus mengenai hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK dilakukan berdasarkan laporan JATAM Kaltim pada akhir tahun 2022 lalu. Di kawasan tambang batu bara ilegal di Desa Sumber Sari dan Dusun Merangan, terungkap sejumlah nama para aktor di antaranya seperti H. Abdul Hakim, H. Sahli, H. Amin, Riswan, Bambang, dan Umai³, bahkan menyeret nama lain seperti

¹ Mongabay. 2023. "Tambang Batu bara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur." <https://www.mongabay.co.id/2023/02/04/tambang-batubara-ilegal-masih-marak-di-kalimantan-timur/> diakses pada 8 February 2024

² BBC Indonesia. 2023. "Kasus Korupsi Terkait Tambang Ilegal di Indonesia." <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64583574>, diakses pada 8 Februari 2024

³ Salinan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Gakkum KLHK, 15 Desember 2022, Sumber Arsip JATAM Kaltim

Kapten Silalahi yang menjabat sebagai Komandan Rayon Militer (Danramil) setempat⁴. Peran mereka terbentang mulai dari pemilik dan pemodal. Informasi ini potensial untuk ditelusuri lebih lanjut temalnya dengan perusahaan resmi yang lebih besar sebagai penadah dan relasinya dengan aktor dan partai politik. Hal ini dikuatkan dengan temuan PPATK lagi yang kembali mengekspos aliran dana tambang ilegal kepada sejumlah bendahara partai politik untuk kampanye Pemilu 2024⁵.



Gambar 1: Foto Ismail Bolong
Sumber Foto: <https://news.detik.com/berita/d-6470026/bareskrim-limpahkan-berkas-perkara-tambang-ilegal-ismail-bolong-ke-kejagung>

Khusus mengenai hasil penyelidikan sementara yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum) KLHK dilakukan berdasarkan laporan JATAM Kaltim pada akhir tahun 2022 lalu. Di kawasan tambang batu bara ilegal di Desa Sumber Sari dan Dusun Merangan, terungkap sejumlah nama para aktor di antaranya seperti H. Abdul Hakim, H. Sahli, H. Amin, Riswan, Bambang, dan Umai⁶, bahkan menyeret nama lain seperti Kapten Silalahi yang menjabat sebagai Komandan Rayon Militer

(Danramil) setempat⁷. Peran mereka terbentang mulai dari pemilik dan pemodal. Informasi ini potensial untuk ditelusuri lebih lanjut temalnya dengan perusahaan resmi yang lebih besar sebagai penadah dan relasinya dengan aktor dan partai politik. Hal ini dikuatkan dengan temuan PPATK lagi yang kembali mengekspos aliran dana tambang ilegal kepada sejumlah bendahara partai politik untuk kampanye Pemilu 2024⁸.

⁴ Tempo.2022 “Perlawanan dari Balik Bukit Biru” <https://rb.gy/xugvaq> diakses pada 8 Mei 2024

⁵ Kompas. 2023. “PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan dari Tambang Ilegal Buat Kampanye.” <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/22401131/ppatk-temukan-transaksi-mencurigakan-dari-tambang-ilegal-buat-kampanye>, diakses pada 8 Februari 2024

⁶ Salinan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Gakkum KLHK, 15 Desember 2022, Sumber Arsip JATAM Kaltim

⁷ Tempo.2022 “Perlawanan dari Balik Bukit Biru” <https://rb.gy/xugvaq> diakses pada 8 Mei 2024

⁸ Kompas. 2023. “PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan dari Tambang Ilegal Buat Kampanye.” <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/22401131/ppatk-temukan-transaksi-mencurigakan-dari-tambang-ilegal-buat-kampanye>

Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Tenggarong, Kutai Kartanegara adalah ruang hidup yang terancam bahkan mengalami degradasi dan kebangkrutan ketika operasi penambangan ini tetap berjalan tanpa ada sikap dan penindakan yang tegas oleh negara. Desa Sumber Sari didiami oleh mayoritas masyarakat pendatang yang berasal dari Pulau Jawa pada 1972, pada era pemerintahan Orde Baru. Identitas dan kekhasan desa ini sangat dikenal oleh kalangan masyarakat Kalimantan Timur sebagai salah satu desa pertanian, penghasil beras dan sayur-sayuran seperti sawi, kangkung, selada. Sebagian masyarakatnya juga berprofesi sebagai petambak ikan. Selain desa penghasil pangan, desa ini juga dikenal sebagai desa wisata yang dikukuhkan pada 2013 dengan sebutan Desa Wisata Bukit Biru.

Wilayah ini merupakan aset alami yang dijaga dan dikelola oleh masyarakat Sumber Sari secara mandiri. Pemandangan hamparan hijau pertanian milik warga dapat dinikmati dari atas bukit menjadi pemandangan dan pengalaman menarik yang didapatkan para pengunjung ketika mereka mengunjungi lokasi tersebut.

Sejumlah potensi penunjang ekowisata di sana di antaranya ada Gunung Bukit Biru dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut yang kini ramai dikunjungi dan dijadikan tempat *tracking* dan *camping*. Selain itu, ada juga air terjun, kesenian kuda lumping, reog dan campur sari, potensi kuliner tempe daun, lubang terowongan tambang peninggalan zaman Belanda hingga kalender *event* setempat bersih desa dan syukuran panen tiap tahunnya.⁹

Namun, di balik kekayaan sumber daya dari sektor pertanian dan keindahan wisata pemandangan yang disajikan, terdapat ancaman serius sejak tahun 2012 hingga kini dihadapi oleh masyarakat Sumber Sari. Gempuran ekonomi ekstraktif seperti tambang batu bara, legal maupun ilegal, menjadi sebuah tawaran yang menggurkan, baik lewat kesempatan kerja maupun nominal ganti rugi. Akan tetapi, karena kuatnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang akan mereka terima ketika aktivitas pertambangan batu bara dibiarkan beroperasi membuat masyarakat yang mayoritasnya menggantungkan hidup dari ekonomi pertanian dan perikanan serta pariwisata secara kompak bersama-sama menolak dan melawan masuknya perusahaan baik dari perusahaan legal seperti PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) maupun ilegal atau oleh warga lokal acap dikenal sebagai “tambang koridor”.

tambang-ilegal-buat-kampanye, diakses pada 8 Februari 2024

⁹ Muhammad Fauzan Noor dan Dini Zulfiani “Analisa Potensi Wisata Pada Desa Wisata Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara”, *Jurnal Darmawisata*, Vol. 1 No. 1 (2021).

Pada akhir 2021, masyarakat Sumber Sari sudah melakukan pelaporan ke pihak kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI) dan juga melakukan rapat dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Berbagai ancaman dan intimidasi yang mereka terima baik dari para preman tambang maupun dari pihak aparat keamanan yang juga diduga ikut terlibat mengamankan aktivitas tersebut.

Petani Sumber Sari terdesak karena lahan-lahan produktif dirampas dan menurunnya kualitas kesuburan tanah dan air. Sejumlah temuan investigasi oleh Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menemukan kandungan asam dan logam berat di sejumlah lubang tambang warisan tambang ilegal mencemari tubuh Sungai Pelai yang mengalir ke irigasi dan sumber air warga Sumber Sari. Dari enam titik pemeriksaan sampel air di genangan bekas lubang tambang, air aliran Sungai Pelai hingga pintu air Waduk Sukodono di desa Sumber Sari. Semua titik tersebut ditemukan mengandung air asam tambang dengan pH yang terburuk mencapai derajat keasaman 3 dan 2¹⁰.

Pada saat yang sama, Desa Sumber Sari harus menanggung warisan panjang Revolusi Hijau dan model pertanian intensif yang diperkenalkan pada era Orde Baru untuk meningkatkan produktivitas dan nilai kapital tanah. Para petani dan desa-desa pertanian kala itu diguyur berbagai produk benih hingga pupuk dan obat-obatan kimia untuk memaksimalkan hasil pertanian yang memiliki dampak panjang pada kesehatan lingkungan. Begitu juga dengan model Pariwisata massal yang menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang baru yang kini sedang dihadapi demi meningkatkan pendapatan warga dan desa.

Guna memotret berbagai ancaman atas keberlanjutan kehidupan desa sekaligus memahami pergulatan panjang dan menyejarah warga Sumber Sari, mulai dari sejarah asal mula, proses pembentukan masyarakat dan pengetahuannya hingga mendokumentasikan bagaimana perjalanan perlawanan warga, maka JATAM Kaltim melakukan penelitian ini.

¹⁰ Salinan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Gakkum KLHK, 15 Desember 2022, Sumber Arsip JATAM Kaltim

1.2 Alur dan Metode Penelitian

Penelitian dimulai dengan *workshop* perencanaan penulisan yang bertujuan untuk membekali peserta mempersiapkan tulisannya, peserta mendapatkan materi bagaimana tahapan menyusun penulisan dan proses kreatifnya. Bagaimana membuatnya menarik. Peserta ditunjukkan contoh-contoh tulisan menarik hingga menyusun pertanyaan kunci penelitian.

Para peserta atau penulis membaca sejumlah buku dan hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan sebagai bagian dari kajian literatur untuk menyokong proses penelitian. Beberapa sumber literatur tersebut di antaranya:

1. *Nanos Gigantum Humeris Insidentes: Sebelum Meneliti Susunlah Bibliografi Beranotasi dan Kajian Pustaka* (2020) karya Noer Fauzi Rachman dan Ahmad Nashih Luthfi yang diterbitkan STPN Yogyakarta.
2. *Gender dan Pengelolaan Sumber Daya Alam: Sebuah Panduan Analisis* (2001) karya Meentje Simatauw, Leonard Simanjutak, dan Pantoro Tri Kuswardono yang diterbitkan Yayasan PIKUL (Penguatan Institusi dan Kapasitas Lokal), Kupang NTT, Indonesia.
3. *Serial Panduan Lapangan Studi Agraria dan Pemberdayaan Perempuan. Etnografi & Fotovoices Buku Kedua* (2016) karya Anna Mariana, Ciptaningrat Larastiti, Noer Fauzi Rachman, dan Siti Maimunah yang diterbitkan Sajogyo Institute Bogor.
4. *Ethnography in/of the world system: The emergence of multi-sited ethnography. Annual review of anthropology* (1995) karya George E. Marcus. Annual Review of Anthropology.
5. *Bersarang di Kampung Panduan Belajar Bersama Rakyat* (2018) karya Aisah, dkk. yang diterbitkan Sajogyo Institute, Bogor.

Kajian literatur (*literatur review*) atas buku dan hasil penelitian tersebut lalu dibuat anotasi bibliografinya sepanjang maksimal 500 kata (sekitar 1 halaman) oleh masing-masing penulis. Setelah itu, para penulis melakukan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian *live in*, atau tinggal bersama dengan komunitas dan warga di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara dalam jangka waktu yang ditentukan sejak April hingga Mei 2024. Finalisasi penulisan dilakukan melalui *workshop I* pada 14-16 Juni 2024 dan *workshop II* pada 12-13 Juli 2024 untuk proses penyuntingan akhir.

1.3 Pertanyaan Kunci

Penelitian ini mencoba untuk menjawab sejumlah pertanyaan turunan yang pada dasarnya bermula dari tiga pertanyaan kunci berikut ini yaitu;

1. Bagaimana sejarah pembentukan masyarakat dan dinamika politik-ekonomi lokal mempengaruhi perlawanan masyarakat atas pertambangan di Desa Sumber Sari?
2. Bagaimana model-model ekonomi yang ada, termasuk pertambangan di masyarakat mempengaruhi politik lokal di Desa Sumber Sari?
3. Apa saja tantangan pemulihan dan ekonomi yang bisa diajukan untuk model yang adil dan berkelanjutan?



2. Pengaruh Kebijakan dari Masa ke Masa pada Desa Sumber Sari

2.1 Era Revolusi Hijau Orde Baru dan Dampaknya

Di masa pemerintah orde baru terjadi kebijakan nasional yang berdampak pada skala lokal seperti di Desa Sumber Sari, kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara melalui penyeragaman jenis varietas pertanian, orientasi dalam mengejar kebutuhan pasar, penggunaan secara massal obat-obatan kimia yang berpengaruh buruk pada lingkungan dan kesehatan hingga menghilangkan kearifan lokal.

Hal tersebut dimulai dari tren revolusi hijau di Indonesia yang menggejala di dunia, fenomena ini berlangsung sekitar tahun 1960-an hingga 1980-an. Program diluncurkan dengan tujuan utama untuk meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, guna mencapai swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan pada impor. Revolusi Hijau di Indonesia tidak hanya berfokus pada padi tetapi juga tanaman pangan lainnya seperti jagung, kedelai, dan ubi jalar. Revolusi Hijau meningkatkan produksi beras pada tahun 1984, Indonesia mencapai swasembada beras untuk pertama kalinya, dengan produksi mencapai 27,7 juta ton¹¹.

Jauh sebelum Indonesia menjalankan Revolusi Hijau, proyek ini juga telah lebih dahulu dijalankan di Meksiko pada 1950 dan Filipina pada 1960 dan membawa perubahan besar dalam praktik pertanian di banyak negara berkembang, terutama di Asia. Istilah Revolusi Hijau sendiri untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh William S. Gaud pada 1968. Ia adalah salah seorang staf U.S. Agency for International Development (USAID) di Indonesia. Revolusi Hijau kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Panca Usaha Tani” program yang dipelopori para ilmuwan IPB¹².

Program ini berupaya memperkenalkan penggunaan teknologi pertanian yang lebih canggih untuk meningkatkan produksi hasil pertanian. Mulai dari penggunaan bibit unggul hingga obat untuk tanaman seperti pupuk kimia dan pestisida.

¹¹Jihan Nasywa Azzahra, Tegar Warap prada Khoiri, Mei Candra Ayu Puspita, Eko Ribawati, “Revolusi Hijau Masa Orde Baru”, *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, Vol.5 Tahun 2024.

¹²Wahyudi Nugroho, “Konstruksi Sosial Revolusi Hijau di Era Orde Baru”, *SOCA: Jurnal Sosial-Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, Vol 12, No. 1 Desember 2018.

Selain itu, untuk mempercepat aktivitas produksi program ini, pemerintah juga memperkenalkan penggunaan traktor dan alat-alat pertanian modern lainnya.

Di Indonesia, salah satu tempat yang menjadi lokasi penerapan program Revolusi Hijau berada di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Akibat dari transisi model pertanian tersebut mengakibatkan peningkatan hasil produksi padi yang signifikan, meskipun pada 1990an mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor.¹³

Namun di balik program tersebut, juga terdapat banyak sekali dampak negatif yang dirasakan masyarakat. Petani tidak hanya mengalami ketergantungan terhadap pupuk kimia, tetapi juga mengalami kesenjangan sosial karena peraturan pasca-Revolusi Hijau yang sangat menghambat pertanian. Peraturan yang ketat membuat petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Akibatnya, baik petani kaya maupun miskin mau tidak mau harus membayar harga yang lebih tinggi untuk pupuk non-subsidi sehingga menyebabkan banyaknya tunggakan kredit para petani¹⁴.

Selain itu, dampak negatif dari model pertanian Revolusi Hijau juga dapat dianggap sebagai kegagalan karena produknya mengandung banyak residu pestisida yang sangat merusak ekosistem lingkungan dan kesuburan tanah. Pestisida telah lama diketahui menyebabkan iritasi pada mata dan kulit, gangguan pernapasan, kehilangan daya ingat, dan kanker dalam jangka panjang¹⁵. Ibu hamil memiliki risiko melahirkan janin yang cacat jika dia mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung residu pestisida. Penggunaan pestisida juga menyebabkan ledakan hama karena dosis berlebihan pestisida membuat hama kebal dan membunuh musuh alami hama tersebut.¹⁶

Di Desa Sumber Sari, Loa Kulu, Kalimantan Timur, Revolusi Hijau yang acap dikenal dengan sebutan *BIMAS* atau Bimbingan Massal dimulai pada 1988¹⁷. Sosialisasi tersebut dijalankan oleh Pemerintah lewat dinas pertanian ke desa-desa di Kabupaten Kukar. Ketika sosialisasi tersebut, warga diajarkan dan diperkenalkan berbagai macam teknologi pertanian modern. Dari jenis varietas bibit yang berbeda dari bibit yang digunakan oleh masyarakat. Bibit yang

¹³Lailatul Muamaroh, "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (*BIMAS*) Padi di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998", *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, Vol 5, Halaman 458.

¹⁴Loc.cit. Hal 458. Halaman 5

¹⁵Jihan Nasywa Azzahra, Tegar Warap prada Khoiri, Mei Candra Ayu Puspita, Eko Ribawati, "Revolusi Hijau Masa Orde Baru", *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, Vol.5 Tahun 2024. Halaman 5

¹⁶Loc.cit.

¹⁷Wawancara dengan Darimin, warga RT 02 Desa Sumber Sari pada 18 Juni 2024.

digunakan selama ini seperti bibit *pandak manis*, dianggap lambat dalam proses pertumbuhannya dan memakan waktu paling lama hingga 7 bulan untuk satu kali panen, sedangkan bibit yang diberikan oleh pemerintah seperti *bibit IR 64*¹⁸ hanya butuh waktu 3 bulan saja dalam satu kali panen.¹⁹ bibit padi varietas baru ini mulai diperkenalkan pada 1985.²⁰



Gambar 2: Darimin (54 Tahun),
Warga RT 02, Desa Sumber Sari

Darimin (54 Tahun), salah seorang warga dari desa sumber sari yang berprofesi sebagai petani dan ketua RT 02 menceritakan bagaimana awal mula program tersebut berjalan dan sangat berdampak pada perubahan aktivitas pertanian warga. Awalnya, masyarakat menanam padi hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Namun, lambat laun berubah untuk memenuhi pasar, yang awalnya subsisten beralih menjadi ke mode intensif. Yang awalnya menanam hanya satu kali dalam setahun, kini “dipaksa” menjadi dua hingga tiga kali dalam satu tahun.

“Dulu warga di desa ini menanam padi hanya satu kali dalam setahun, tapi semenjak adanya program BIMAS dari pemerintah, warga disuruh untuk menanam dua kali dalam satu tahun, dan hasil panennya itu juga dijual,”

tutur Darimin. Ia juga menuturkan awal mula masyarakat desa menggunakan pupuk kimia seperti Pupuk Urea, Pupuk NPK (Nitrogen, Phosphrus, dan Kalium) dan obat-obatan seperti pestisida. “Sejak adanya sosialisasi itu kami jadi kenal dan ketergantungan menggunakan pupuk sama obat pestisida, padahal sebelumnya kami tidak pernah menggunakan obat-obatan tersebut,” tambah Darimin.

¹⁸Padi IR 64 diproduksi pada tahun 1985 yang disebarkan pertama kali ke Filipina dan beberapa negara Asia lainnya seperti Kamboja hingga Indonesia, diakses pada Februari 2024 <https://www.cgiar.org/innovations/ir64-the-worlds-mega-rice/>

¹⁹Wawancara dengan Darimin, warga RT 02 Desa Sumber Sari pada 18 Juni 2024

²⁰<https://desasumbersari44.wordpress.com/sejarah-desa/> diakses pada 17 Juni 2024

Pertanian intensif juga dianggap tidak menghargai metode pertanian lokal, seperti yang diungkapkan oleh Mbah Sandi (73 Tahun) warga Sumber Sari lainnya. “Misalnya, mau menanam padi, mau bibit dicari harinya, kayak mau menanam padi dicari hari baiknya, pakai tanggalan jawa yang ada *wuku* (Hari Baik) dan biasanya bulan *selo bulan* (Waktu di antara bulan Syawal dalam peninggalan Islam dan Dzulhijjah) yang baik,” tutur Mbah Sandi. Akibat dari program tersebut juga membuat para petani terpaksa meninggalkan teknik pertanian yang tradisional dan ramah terhadap ekosistem tanah dan lingkungan tersebut. “Dulu, ya, subur padinya. Nggak perlu pupuk kimia juga, panennya bagus sebelum adanya program itu,” ungkap Mbah Sandi.

Celakanya, pengaruh kebijakan nasional pada masa Orde Baru ini masih terus berlangsung hingga saat ini, meskipun terjadi perubahan melalui reformasi politik pada 1998 dengan munculnya desentralisasi atau otonomi daerah. Pemerintah Pusat tidak lagi secara langsung mengendalikan kebijakan, tetapi kendali kebijakan diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Meskipun seolah ada harapan, nyatanya perubahan struktur pemerintahan dari kewenangan yang dimiliki eksklusif oleh Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Selain itu, desentralisasi atau otonomi daerah punya sisi buruk lain dan berdampak pada skala lokal. Salah satunya obral perizinan sumber daya alam, termasuk obral izin pertambangan batu bara di daerah.

2.2 Era Otonomi Daerah dan Obral Izin Tambang

Otonomi Daerah merupakan sebuah program kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada 2004 melalui diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.²¹ Kebijakan tersebut merupakan upaya untuk mengubah sistem pemerintahan sebelumnya yang sangat sentralistik menjadi desentralistik yang menjadi salah satu kritik gerakan reformasi pada 1998.

Konsep utama Otonomi Daerah adalah tentang tata kelola negara yang lebih efektif, agar setiap daerah bisa mengambil keputusan atau kebijakannya sendiri. Hakikatnya, asas Otonomi Daerah merupakan pembagian kekuasaan dalam

²¹UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH diakses melalui <https://jdih.go.id/pencarian/detail/1325571/undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah> diakses pada 13 Agustus 2024

mekanismenya yang berbentuk vertikal. Hubungan atas-bawah ini disebut juga sebagai pemisahan kekuasaan. Pemisahan ini untuk distribusi kekuasaan sehingga pelaksanaannya lebih efektif²². Namun, di balik cita-cita mulia kebijakan Otonomi Daerah, terdapat sisi buruk dalam pengelolaan sumber daya alam yang dialami oleh masyarakat, khususnya di Kalimantan Timur termasuk masyarakat di Desa Sumber Sari.

Kebijakan terkait Otonomi Daerah memberikan kewenangan kepada Bupati dan Walikota untuk menerbitkan izin. Hal ini kemudian mengakibatkan keran perizinan pertambangan semakin dibuka lebar. Saat Pemerintah provinsi Kalimantan Timur mengambil alih perizinan, obral perizinan semakin terlihat jelas. Izin pertambangan di Kaltim berjumlah 1.404 IUP dengan luas 4.131.735,59 hektare dan jumlah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) sebanyak 30 izin dengan luas 1.006.139,63 hektare. Total luas seluruh perizinan pertambangan di Kaltim mencapai 5.137.875,22 juta hektare atau setara dengan penguasaan 40,39 persen²³ daratan dan perairan provinsi ini.



Gambar 3: Foto Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari mengenakan rompi oranye sebagai tersangka kasus Korupsi SDA Tahun 2017, oleh KPK.

Sumber foto : [KPK resmi tahan Bupati Kukar Rita Widyasari \(rappler.com\)](https://www.rappler.com/kpk-resmi-tahan-bupati-kukar-rita-widyasari).

²²Otonomi daerah : pengertian, sejarah, tujuan, asas dan prinsip diakses melalui https://wawasankebangsaan.id/otonomi-daerah/#google_vignette diakses pada 13 Agustus 2024

²³Jatam.2024. “Siapa Penguasa Tanah Kaltim?” diakses melalui <https://jatam.org/id/lengkap/siapa-penguasa-tanah-kaltim> diakses pada 13 Agustus 2024



Gambar 4: Foto Kaltim penuh lubang tambang (Lubang Tambang dibalik jalan TOL Samarinda - Balikpapan)

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, menurut KPK, sepanjang 2007-2017 ada 31 tersangka korupsi sumber daya alam di masa Otonomi Daerah. Lingkaran korupsi Sumber Daya Alam tersebut telah melibatkan mantan Bupati seperti Syaukani HR pada 2007²⁴, Wakil Bupati dan anggota DPRD, bahkan mewaris hingga putri Syaukani yang juga menjabat sebagai Bupati selanjutnya yakni Rita Widyasari.²⁵ Kutai Kartanegara memang menjadi lumbung korupsi SDA karena menjadi kabupaten terkaya dengan sumbangan sektor SDA dan tambang sebesar 59,81 persen di anggaran daerahnya.²⁶

Hingga kini meskipun modifikasi dilakukan pada praktik dan operasi otonomi daerah, korupsi masih menjadi budaya, menurut KPK sepanjang tahun 2021-2023 sudah terdapat 61 kepala daerah terjerat korupsi²⁷.

²⁴Detik.2024. "KPK Syaukani lakukan 3 modus korupsi di Kaltim." <https://news.detik.com/berita/d-755424/kpk-syaukani-lakukan-3-modus-korupsi-di-kaltim> diakses pada Selasa 13 Agustus 2024

²⁵Tempo.2023. "61 kepala daerah jadi tersangka korupsi." <https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal> diakses pada Selasa 13 Agustus 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/09/08351521/profil-rita-widyasari-eks-bupati-kukar-ikuti-jejak-ayah-korupsi-hingga?page=all> diakses pada 13 Agustus 2024

²⁶Kukar Paper, "Perkuat Ekonomi, Kukar fokus pembangunan berbasis pertanian, pariwisata dan ekraf" <https://kukarpaper.com/perkuat-ekonomi-kukar-fokus-pembangunan-berbasis-pertanian-pariwisata-dan-ekraf/> diakses pada 13 Agustus 2024

²⁷Tempo. 2023. "61 Kepala Daerah jadi tersangka korupsi pada 2021-2023" <https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkaran-setan-sejak-awal> diakses pada tanggal 13 agustus 2024

Kutai Kartanegara saat ini merupakan tuan rumah terbanyak dengan jumlah izin tambangnya dari 14 kabupaten dan kota. Kukar menempati peringkat teratas dengan jumlah 271 izin pertambangan dan menguasai lahan seluas 1, 2 juta hektar, termasuk salah satu izin tersebut diperuntukkan bagi perusahaan PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS) yang dikeluarkan pada 2009 dengan luas konsesi seluas 3.411 hektar.²⁸ Pertambangan tersebut akan membongkar wilayah tiga desa, termasuk salah satunya adalah Desa Sumber Sari.

Kehadiran perusahaan pertambangan batu bara milik PT. BMS pada 2009 lalu merupakan penyebab terganggunya kehidupan masyarakat Desa Sumber Sari, seperti yang telah disampaikan oleh Legimin (52 Tahun). Laki-laki yang juga menjabat sebagai ketua RT 09 Desa Sumber Sari ini masih mengingat jelas bagaimana cerita perlawanan warga saat perusahaan pertambangan batu bara PT BMS ini masuk ke desanya pada 2009. Kehangatan suasana desa dan harmoni antar sesama warga yang sudah terjalin sejak puluhan tahun lalu mulai terusik.

Walaupun mesti menghadapi berbagai ancaman tambang, melalui Otonomi Daerah pula membuka ruang munculnya sejumlah peraturan dan kebijakan lokal yang dimanfaatkan warga. Kesempatan tersebut menjadi langkah potensial sekaligus penghambat laju kebijakan yang merusak sebelumnya. Seperti terbitnya sejumlah peraturan dan kebijakan lokal tentang perlindungan pertanian dan pangan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01.1/590/PL/DPPR/II/2022²⁹ Tentang Penetapan Kawasan Pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, peraturan kebijakan lokal pariwisata nomor 602/SK-BUP/HK/2013³⁰ Tentang Penetapan Lokasi Desa Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara.

²⁸MinerbaOneDataIndonesia, profil perusahaan <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/1510?jp=1> diakses pada tanggal 13 agustus 2024

²⁹Salinan diperoleh dari pemerintah desa sumber sari

³⁰Salinan diperoleh dari pemerintah desa sumber sari



Gambar 5: Petani sayur di Desa Sumber Sari

2.3. Melawan Tambang Melalui Lumbung Pangan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar sejak 2018 hingga 2023, Desa Sumber Sari dengan luas wilayah tanam padi yang mencapai 678 hektar bisa menghasilkan panen setiap tahun sebanyak 13.560 ton.³¹ Dari hasil tersebut menjadikan Desa Sumber Sari berada di posisi ketiga dari 15 desa se-kecamatan Loa Kulu sebagai salah satu desa lumbung penyumbang pangan dan sayuran.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Sumber Sari merupakan desa yang mayoritas hingga 80 persen berprofesi sebagai petani. Pemerintah Kukar juga menetapkan Desa Sumber Sari sebagai *pilot project* upaya peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.³²

Sebelumnya pada 2020-2021, Desa Sumber Sari mendapatkan anugerah sebagai Kampung Tangguh dari Polda Kalimantan Timur karena ketahanan pangan mereka pada saat menghadapi pandemi Covid-19 dan ikut berkontribusi membantu pasokan pangan desa-desa sekitar dan Kota Tenggarong.³³

³¹ Website Resmi BPSK Kutai Kartanegara, <https://kukarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbyfeve=Nzg2MDgzODA0NDI4MjZlNjI4YmZkYjc5&xzmn=aHR0cHM6Ly9rdWthc-mthYi5icHMuZ28uaWQvcHVibGljYXRpb24vMjAxOS8wOS8yNi83ODYwODM4MDQ0M-jgyNmU2MjhiZmRiNzkva2VjYW1hdGFuLWxvYS1rdWx1LWRhbGFtLWFuZ2thLTIwMT-kuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wOC0xMyAxNjowNDoxMQ%3D%3D> diakses pada 8 juni 2024

³² <https://kukarkab.go.id/v2/berita/982/Bupati-Kukar--Desa-Sumber-Sari-Kecamatan-Loa-Kulu-Pilot-Project-Pertanian-Berbasis-Kawasan-di-Kukar> diakses pada 13 Agustus 2024

³³ KutaiKartanegara.com, Desa Sumber Sari Di Loa Kulu Lomba Kampung Tangguh Polda Kaltim <https://www.kutaiartanegara.com/news.php?id=7029> diakses pada 13 Juni 2024

Hal ini menyebabkan pada 2022, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kutai Kartanegara Nomor 01.1/590/PL/DPPR/II/2022, tentang Penetapan Kawasan Pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Desa Sumber Sari merupakan salah satu desa yang memiliki potensi pertanian terbesar di Kukar dan menjadi salah satu lumbung pangan yang tersisa belum disentuh oleh pertambangan di wilayah Kukar. Sebagian luas wilayah tersebut mencapai 1.416 hektar³⁴ dan hampir 80 persen lahan pangan pertanian dan perikanan. Sementara selain menghasilkan padi, desa ini juga memasok kebutuhan sayur-mayur seperti sawi, kacang panjang, bayam dan kangkung mulai dari pasar Mangkurawang di kota Tenggarong hingga Pasar Segiri di Samarinda.

Selain itu, Sumber Sari memiliki berbagai deret prestasi yang disematkan oleh banyak institusi, mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Pada Juli 2020, Mabes Polri mencanangkan wilayah ini sebagai juara Kampung Tangguh di Kaltim, mereka menilai ketahanan pangan desa dan berkontribusi membantu desa-desa sekitar menghadapi pandemi covid-19.³⁵

Tidak hanya itu, Sumber Sari juga disematkan sebagai Kampung Iklim yang berkontribusi pada urusan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim pada 2018, Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan (KLHK).³⁶ Bahkan pada 2023, Desa Sumber Sari juga menerima penghargaan dari Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalimantan Timur (BKB3AKaltim). Desa ini berhasil meraih penghargaan Gender Award 2023 dalam acara Parade Gender Kalimantan Timur dan mengungguli desa-desa lainnya di Kaltim karena kepedulian desa terhadap kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Desa ini juga telah menyiapkan regulasi terkait kesetaraan gender yang dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes).³⁷

Berbagai pencapaian tersebut, menjadi salah satu cara untuk membendung masuknya industri ekstraktif di wilayah mereka. Selain itu, kebijakan lokal lain

³⁴Data Profil Desa Sumber Sari 2023

³⁵KutaiKartanegaranews.com, “kampung tangguh polres kukar di desa sumber sari juara I, Bakal Wakil Polda kaltim di tingkat nasional” <https://www.kutaiKartanegaranews.com/2021/01/kampung-tangguh-polres-kukar-di-desa-sumber-sari-juara-i-bakal-wakili-polda-kaltim-di-tingkat-nasional.html> diakses pada 13 agustus 2024

³⁶Kaltim.tribun. 2019. “ 5 desa dan satu dusun di kukar ini jadi sasaran program kampung tangguh iklim” <https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/27/5-desa-dan-satu-dusun-di-kukar-ini-jadi-sasaran-program-kampung-iklim?page=1> diakses pada 13 Juni 2024

³⁷Kukarkab.”desa sumber sari raih gender award 2023” <https://kukarkab.go.id/v2/berita/1186/Desa-Sumber-Sari-Raih-Gender-Award-2023> diakses pada 13 Juni 2024



Gambar 6: Pemandangan Ekowisata Desa Sumber Sari, gabungan lahan pertanian dan bentang Bukit Biru

yang dimanfaatkan warga dan pengurus Desa Sumber Sari adalah Status wilayah mereka sebagai Desa Wisata pada 2013, untuk membendung laju ekspansi pertambangan batu bara.

2.4. Bersiasat Lewat Status Desa Wisata

Pada 2013, masyarakat Desa Sumber Sari bekerja sama dengan Sri Mulyani, Pejabat Dinas Pariwisata Kutai Kartanegara mengajukan untuk menjadikan kawasan Desa Sumber Sari menjadi Desa Wisata Taman Arum demi menghadang rencana pertambangan batu bara.

“Atas saran dari beberapa pihak seperti akademisi, tokoh politik, dan tokoh pemerintahan, pada 2013 Pemerintah Desa mengurus untuk dijadikan desa wisata dan akhirnya berhasil diterbitkan oleh Bupati pada saat itu. Inilah salah satunya yang kami jadikan senjata untuk menolak pertambangan,” jelas Dedi, ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Taman Arum, Desa Sumber Sari.

Berdasarkan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 602/SK-BUP/HK/2013 tentang Penetapan Lokasi Desa Wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Sumber Sari akhirnya ditetapkan sebagai desa wisata pada 23 Agustus 2013.

Tidak banyak objek wisata pendakian dan perkemahan di Kaltim. Objek wisata Puncak Bukit Biru setinggi 600 meter di atas permukaan laut (Mdpl) yang berlokasi di RT 09 Desa Sumber Sari adalah satu-satunya wisata alam pendakian

dan perkemahan yang aksesnya mudah dikunjungi dibanding wisata serupa di tempat lain.

Wisata puncak bukit biru ini juga terhubung dengan hamparan pemandangan lahan pertanian berupa sawah, kebun-kebun sayur dan berada di wilayah tertinggi, sehingga dapat melihat lega Kota Tenggarong. Warga sekitar juga menjadikan rumahnya sebagai *homestay*, mereka menyediakan paket agrowisata, belajar menanam dan memetik sayur hingga buah-buahan di lahan pertanian dan kebun.³⁸

Puncak Bukit biru adalah salah satu dari 7 kawasan wisata andalan di Kutai Kartanegara³⁹, ratusan pengunjung disebut ramai saat akhir pekan. Per bulan pendapatan dari wisata mencapai sekitar 2,5 juta rupiah⁴⁰. Dedi, Ketua Pokdarwis Dewi Arum menyebutkan pendapatan mereka bahkan pernah hampir mencapai 80 juta rupiah per tahunnya.⁴¹ Pendapatan tersebut belum lagi ditambah dengan objek dan kegiatan wisata lain seperti air terjun, embun, dan wisata sejarah terowongan kereta batu bara zaman Belanda.

Seperti yang disampaikan oleh Dedi dan warga desa lainnya, berbagai potensi wisata yang ada di Desa Sumber Sari adalah siasat mereka membendung rencana pertambangan batu bara yang mengancam di sana.

³⁸ Wisata Alam dan Pendidikan Presentasi Power Point, Pokdarwis Dewi Arum, diperoleh April 2024

³⁹Okezone.com. 2024. “7 tema wisata hits di kutai kartanegara, pantai eksotis hingga taman lampu warna- warni. <https://travel.okezone.com/read/2024/01/15/408/2954827/tempat-wisata-hits-di-kutai-kartanegara-pantai-eksotis-hingga-taman-lampu-warna-warni?page=all> diakses pada 16 juni 2024

⁴⁰Kaltim kece. 2021. “ wisata puncak bukit biru, tawarkan keindahan dari ketinggian hingga air terjun” <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/wisata-puncak-bukit-biru-tawarkan-keindahan-dari-ketinggian-hingga-air-terjun> diakses pada 23 juni 2024

⁴¹Wawancara dede ketua kelompok sadar wisata (pokdarwis) 25 april 2024



Gambar 7 dan 8: Wisata Cagar Budaya Jalur Terowongan Transportasi Tambang Batu Bara Oost-Borneo Maatschappij, RT 4, Desa Sumber Sari





3. Pembentukan Masyarakat Sumber Sari: Sejarah dan Migrasi

3.1 Asal Usul dan Sejarah Awal Pemekaran Desa

Secara administratif, Desa Sumber Sari adalah hasil pemekaran dari Desa Loh Sumber. Perbincangan mengenai pemekaran sudah tercetus sejak 2004⁴², tetapi pemekaran baru terwujud pada 28 Desember 2011 yang diresmikan oleh Wakil Bupati Kutai Kartanegara kala itu, Ghufron Yusuf.⁴³ Sebelumnya, saat masih tergabung menjadi Desa Loh sumber, Sumber Sari identik dengan seorang tokoh yang bernama Raden Ismanun. Ia adalah kepala kampung sekaligus tokoh pembangunan Desa Loh Sumber pada 40-80 an. Sosoknya dikenal sangat gigih dalam berkarya dan bekerja. Ia juga sangat berperan penting dalam pembukaan hutan dan semak belukar hingga menjadi pemukiman dan areal persawahan. Namanya pun diabadikan menjadi sebuah jalan di desa Sumber Sari, yaitu Jalan Raden Iswanun.⁴⁴

Asal mula nama Sumber Sari diambil dan digabungkan dari dua nama wilayah yaitu Loh Sumber dan Bangun Sari, keduanya dijadikan satu menjadi “Sumber Sari”. Loh Sumber adalah nama desa yang akan dimekarkan, sedangkan Bangun Sari adalah salah satu dusun yang ada di Loh Sumber dan akan masuk menjadi bagian dari Desa Sumber Sari.

“Dulu ini masih wilayah Loh Sumber, tapi karena Loh Sumber terlalu luas wilayahnya, maka di pecahlah menjadi dua desa,” terang Mbah Sandi (73 Tahun) salah seorang tetua di desa tersebut.

“Dinamakan Sumber Sari karena saat itu Masyarakat Bangun Sari mengadakan rapat musyawarah di Balai Desa. Kita musyawarah kira-kira mau dinamakan apa desa ini. Jadi hasil dari musyawarah kita mengambil singkatnya saja dari “Loh Sumber” kita ambil kata Sumbernya, dan “Bangun Sari” kita ambil kata Sari-nya, dan jadilah desa Sumber Sari,” tambah lelaki yang biasa dipanggil Mbah Sandi ini.

⁴²Sejarah Desa Sumber Sari diakses melalui <https://desasumbersari44.wordpress.com/sejarah-des/> diakses pada 14 Agustus 2024

⁴³Profil Desa Sumber Sari diakses melalui <https://web.archive.org/web/20120501222920/http://humas.kutaikartanegarakab.go.id/read/news/2011/5956/tiga-desa-hasil-pemekaran-di-resmikan.html> diakses pada 13 Agustus 2024

⁴⁴Sejarah Desa Sumber Sari diakses melalui <https://desasumbersari44.wordpress.com/sejarah-des/> pada 14 Agustus 2024

Berdasarkan data suku asli dan pendatang di wilayah Sumber Sari per tahun 2023, terdapat tiga besar suku yang berada di desa yang memiliki jumlah penduduk 3.531 jiwa ini dan tersebar di sebelas Rukun Tetangga (RT). Mereka adalah Suku Jawa dengan jumlah 2.740 jiwa, diikuti urutan kedua oleh Suku Kutai dengan jumlah penduduk 357 jiwa, dan pada urutan ketiga diikuti oleh Suku Bugis dengan jumlah penduduk 240 jiwa.⁴⁵

3.2 Empat Model Pembentukan Masyarakat Sumber Sari

Pembentukan Masyarakat Sumber Sari melalui beberapa cara, di antaranya, *pertama*, pembentukan masyarakat yang prosesnya berasal karena datang dari luar, terutama dari pulau Jawa. Mereka biasanya karena ikut bekerja dengan perusahaan tambang batu bara milik Belanda, *Oost Borneo Maatschappij* (OBM) pada 1888.⁴⁶ *Kedua*, pembentukan masyarakat melalui proses migrasi, yakni masyarakat yang berpindah karena peristiwa menghindari ketegangan politik di daerah asalnya hingga kemudian membangun kehidupan baru di Sumber Sari.

Ketiga, pembentukan masyarakat melalui migrasi atau pindah dari pulau lain secara sengaja untuk merantau. Para perantau yang datang ke Sumber Sari mayoritas dari pulau Jawa. *Keempat*, masyarakat penghuni awal, yang datang seperti *Begak*, karena ditugaskan membuka kampung berasal dari wilayah Hulu Mahakam yang ditugaskan Kesultanan Kutai dan sejumlah dari masyarakat lokal yang juga menempati Sumber Sari, seperti masyarakat Kutai di RT 4.



Gambar 9: Bagan empat model pembentukan masyarakat Desa Sumber Sari.
Diolah oleh Tim Penyusun

⁴⁵Profil Desa Sumber Sari Diakses Pada 15 Agustus 2024

⁴⁶Kamil, A. A., Ahyat, I. S., Sunarti, L., Setiawan, A., & Ismiyani, T. (2016). *Pertambangan batu bara di Kutai, Kalimantan Timur: Dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Kutai 1860-1926 = Coal mining in Kutai East Kalimantan impact on social and economic life Kutai society 1860-1926* (Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431873&lokasi=lokal>



Gambar 10: Potret pintu masuk dari terowongan atau Lobang V Loa Kulu, Kutai Kartanegara, 1948. Sumber : <http://www.sjilvends.nl/506gelis.html>

Pembentukan pertama masyarakat melalui migrasi karena ikut bekerja dengan perusahaan tambang batu bara milik Belanda, *Oost Borneo Maatschappij* (OBM). Periode kedatangan warga ke sumber sari dan wilayah sekitar Loa Kulu ini, dimulai pada masa penjajahan Belanda yang pada saat itu membuka penambangan batu bara OBM di Loa Kulu pada 1888. OBM adalah pertambangan terbesar pertama di wilayah Nusantara kala itu.⁴⁷

Tenaga kerja yang dimiliki oleh OBM banyak berasal dari luar wilayah Kutai dan berasal Eropa dan jumlah karyawannya mencapai ribuan orang.⁴⁸ Setelah masa kemerdekaan, berdasarkan perjanjian konsesi tanah yang berlangsung selama 75 tahun antara Sultan Kutai dengan Pemerintah Kolonial Belanda pada 1955, konsesi OBM akhirnya diserahkan kepada pemerintah Indonesia.⁴⁹

Setelah diambil alih oleh Pemerintah Indonesia, pada 1970 OBM ditutup karena mengalami kebangkrutan. Pasca penutupan OBM para pekerjanya mulai menyebar, ada yang kembali ke kampung halamannya dan ada yang memutuskan menetap. Berdasarkan cerita salah satu sesepuh di Loa Kulu, penambangan batu bara ini menjadi awal mula Loa Kulu dan Sumber Sari mulai dihuni penduduk.⁵⁰

Begitu juga yang diceritakan oleh Sandi tentang proses kedatangan pamannya yang datang ke Kalimantan karena bekerja di OBM. Setelah itu, ia pun datang

⁴⁷Supriyanto, 2019, *Loa Kulu Dalam Catatan*, RV Pustaka Horizon, Samarinda, hlm 22

⁴⁸*ibid* hlm 65

⁴⁹*ibid* hlm 40

⁵⁰*ibid* hlm 23

ke Loa Kulu pada 1951 karena dikontrak OBM untuk menjadi pekerja. Setelah kontrak habis, ia memilih mengundurkan diri dan tidak menerima tawaran untuk perpanjangan kontrak. Alasannya, karena lokasi pertambangan selanjutnya adalah pertambangan bawah tanah. Pertambangan bawah tanah memiliki risiko yang sangat besar. Setelah mengundurkan diri, ia memilih untuk menetap di Bangun Sari, yang menjadi cikal bakal bagian dari pemekaran Desa Sumber Sari di Loa Kulu.

Selain karena datang dan ikut bekerja di OBM, pembentukan masyarakat di Sumber Sari juga melalui proses migrasi, yang membuat orang berpindah karena peristiwa atau ketegangan politik di daerah asalnya.

Pada 1954, belasan perantau dari Sulawesi Selatan datang menggunakan kapal layar dari perairan Sulawesi ke Kalimantan Timur. Mereka datang ke Sumber Sari karena di daerah asal mereka terjadi peristiwa ketegangan politik pemberontakan yang dilakukan oleh gerombolan Kahar Muzakar⁵¹. Seperti yang dikisahkan oleh Saleh Aris (72 Tahun), warga RT 01 desa Sumber Sari, ia datang akibat kampung halamannya di Enrekang, Sulawesi Selatan terjadi pemberontakan Kahar Muzakar yang mengakibatkan hampir seluruh rumah dibakar.

“Hampir semua rumah di kampung saya itu dibakar sama gerombolan Kahar Muzakkar. Kita sembunyi di gua batu itu beberapa bulan, pas sudah aman baru kita berani keluar,” cerita Saleh mengenang. Sang ayahnya pun menjadi korban tawanan dari Kahar Muzakar yang pada saat itu dibawa ke Palopo. “Saya ke sini bersama ibu, kakak, dan paman. Bapak tidak ada karena ditangkap oleh kahar muzakar dan di tahan di Palopo. Pada 1960 bapak saya bebas, lalu menyusul ke Sumber Sari,” Tambah Saleh.

Peristiwa konflik politik DI/TII yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dilatarbelakangi oleh kekecewaan atas kebijakan pemerintah Indonesia. Kekecewaan tersebut melahirkan aksi bersenjata yang berlangsung dari 1950-1965 di Sulawesi Selatan.

Memasuki 1970-an, Sumber Sari mulai didatangi penduduk yang datang untuk merantau. Mayoritas perantau yang datang berasal dari Pulau Jawa. Mereka merantau ke desa ini karena informasi dari keluarga maupun kenalan mereka yang lebih dulu ada di Sumber Sari, baik itu dalam bentuk surat hingga mengunjungi

⁵¹Yuda Prinada, “Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakar: Sejarah, Kronologi, Penumpasan”, *Tirto.id*, <https://tirto.id/pemberontakan-di-tii-kahar-muzakkar-sejarah-kronologi-penumpasan-gaQ5> diakses pada 5 Juni 2024

kembali kampung halaman untuk memanggil keluarga yang lain. Saat itu, wilayah Sumber Sari masih hutan belantara sehingga sangat banyak lahan yang bisa dimanfaatkan dan ditempati.

Tujuan mereka merantau dari Jawa ke Sumber Sari karena ingin mencari sumber penghidupan yang baru. “Alasan orang tua merantau karena waktu di Jawa kami susah, perekonomian kami bersumber dari pertanian yang mana lahannya itu milik bersama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kalau pakai itu harus bergiliran. Setelah ibu saya dapat kabar dari kakaknya yang sudah lebih dulu menetap di sini, kalau di Sumber Sari itu masih banyak lahan yang bisa digunakan untuk bertani, asalkan kita mau capek buka lahan sendiri. Mendengar kabar itu orang tua saya langsung memutuskan untuk merantau ke Sumber Sari,” terang Sukanti, salah seorang warga yang merantau dari Tulungagung, Jawa Timur.

Para perantau yang datang ke Sumber Sari, awalnya mereka bermukim di Dusun Rempanga dan di Dusun Bangun Sari. Setelah berkeluarga, banyak yang pindah ke Taman Arum, begitu pun dengan anggota-anggota keluarga yang datang menyusul untuk merantau di Sumber Sari. “Pendatang yang datang itu awal nya babat hutan di Rempanga dan Bangun Sari untuk mereka tinggal. Setelahnya, keturunan dan anggota keluarga yang menyusul merantau ke sini untuk babat hutan di daerah Taman Arum dan tinggal di sana,” ujar Sandi, warga yang merantau dari Malang, Jawa Timur.

Mereka datang dari daerah asalnya menggunakan transportasi laut. Bahkan untuk sampai di Loa Kulu pun masih menggunakan kapal kecil karena pada saat itu pembangunan belum ada dan hanya ada jalur laut. “Kita naik kapal Pelni 3 hari 3 malam, dan masih kapal kayu kecil. Kira-kira lebarnya 12 Meter. Kapalnya sandar di Balikpapan, dari Balikpapan ke Samarinda naik taksi. Setelah itu, dari Samarinda ke Loa Kulu naik kapal lagi, modelnya itu kayak kapal feri, tapi kecil. Karena belum ada jalan darat yang menuju ke Loa Kulu,” jelas Supranowo, perantau asal Blitar.

Pada awalnya warga masing-masing membuka lahan untuk ditempati dan dijadikan sawah. Karena pada saat itu kondisi sumber sari masih dipenuhi oleh hutan. Barang siapa yang bisa membuka lahan, maka tanah itu akan menjadi miliknya.



Gambar 11: Sibon (81 Tahun) menunjukkan gergaji raksasa miliknya

“Jadi dulu di sini itu yang punya tanah bagi mereka yang mau buka lahan sendiri,” ujar Sukanti. Karena itu, kepemilikan tanah di Sumber Sari adalah mereka yang datang pertama kali merantau, dan diwariskannya secara turun-temurun. Saat itu, Ketika menebangi pohon harus dilakukan secara gotong royong karena ukuran pohon yang besar dan harus ditebang menggunakan gergaji besar. “Pohon-pohonnya dulu itu masih besar seperti drum, terus itu kita tebasi menggunakan gergaji besar untuk buka lahan,” ujar Sandi.

Selain gergaji, warga juga menggunakan Beliung. Butuh sehari-hari untuk menebang pohon. “Kalau mau menebang pohon itu, bisa sehari-hari baru jatuh pohonnya.

Apalagi kalau pakai beliung, kadang sampai seminggu baru berhasil di tebang pohonnya,” ucap Sukanti. Ia juga sempat mendeskripsikan apa yang dimaksud dengan beliung yaitu sejenis kampak, tetapi gagangnya terbuat dari rotan besar. Berbeda dengan kapak yang digunakan untuk membelah kayu, beliung ini biasa digunakan untuk menebang pohon.

Pada 1971, rombongan keluarga Sukanti yang berasal Tulungagung, Jawa Timur datang ke Sumber Sari. Mereka memilih merantau ke Sumber Sari karena faktor ekonomi yang sangat sulit di Jawa. Saat ini keluarga besar Sukanti ada yang bermukim di Dusun Bangun Sari dan Sukodono. “Sekarang *alhamdulillah* perekonomian lebih baik selama di sini, tanah milik orang tua juga banyak yang diwariskan ke anak-anaknya. Di Sukodono itu ada keluarga yang tinggal di sana, di daerah RT 11 ini juga ada saya dan saudara-saudara yang tempati,” ujar Sukanti.

Selain itu, pada tahun selanjutnya, pada 1972, perantau asal Blitar dan Malang juga mulai berdatangan ke Sumber Sari. Pendatang asal Blitar ada Boiman yang lebih akrab dipanggil Sibon (81 Tahun). Ia datang bersama dengan istrinya Supini



Gambar 12: Foto Suparmin, Warga Dusun Taman Arum, Desa Sumber Sari

(74 Tahun). Rasa kasihan orang tua Sibو yang telah lebih dulu merantau ke Sumber Sari membuat orang tuanya untuk mengajak Sibو merantau menyusul mereka. Melihat Sibو yang pada saat masih di Jawa hanya memakan nasi tiwul, menggerakkan hati orang tuanya untuk mengajak ke Sumber Sari mencari penghidupan yang baru. “Waktu orang tua pulang kampung, mereka kasihan lihat saya yang cuma makan nasi tiwul. Jadi di ajaklah buat ikut pindah ke Sumber Sari,” ujar Sibو. Nasi tiwul adalah ubi yang dikeringkan lalu ditumbuk, biasanya ini menjadi alternatif pengganti nasi bagi orang Jawa.

Perantau lainnya yang datang pada 1972 adalah perantau asal Malang yang dimulai oleh Sandi dan kakaknya. Saat itu, pamannya yang ada di Bangun Sari merasa ekonominya selama ditempat tersebut jauh lebih baik. Ia mengirim surat kepada keluarga-keluarganya yang ada di Jawa untuk mengajak datang merantau ke Sumber Sari. “Pada 1972, Pakde saya mengirim surat ke Jawa suruh keluarga yang lainnya datang ke sini. Jadi datanglah saya ke sini sama kakak saya,” ucap Sandi.

Selanjutnya pada 1977, penduduk Sumber Sari mulai ramai, para perantau yang datang bermukim di Rempanga dan Bangun Sari. Pada tahun tersebut, keluarga Parmin juga mulai menempati wilayah Taman Arum yang berada di tengah desa yang kala itu masih dipenuhi hutan belantara. Pada saat itu, baru ada tiga rumah yang ada di Taman Arum. “Dulu yang sudah ada di sini itu Mbah Suratin, Mbah Sibو, dan Mbah Begak. Mereka yang pertama kali menetap di sini, nggak ada orang lagi,” ucap Parmin, salah satu tetua warga desa Sumber Sari.

Suratin dan Sibon adalah pendatang di Sumber Sari, sedangkan Begak adalah warga suku Dayak Benuaq yang pertama kali ada di Taman Arum. Sebagai orang yang pertama kali menempati Taman Arum, Begak memiliki banyak sekali lahan yang tak segan-segan ia berikan dan pinjamkan kepada penduduk lain yang baru datang merantau ke Taman Arum. Seperti yang dikisahkan oleh Parmin, saat sang ayah, Maniok diberikan lahan seluas 3 hektar. “Dulu bapak saya itu dikasih tanah sama orang Dayak di sini luasnya 3 hektar, karena bapak saya dulu bantu Mbah Begak bangun rumah,” tutur Parmin.

Begak adalah penghuni awal wilayah yang kini merupakan Desa Sumber Sari. Ia dibawa oleh Kerajaan Kutai dari wilayah hulu Mahakam dan ditugaskan mengelola pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan Kerajaan Kutai saat itu. Ia diberikan tanah tempat berladang seluas 35 hektar oleh kerajaan untuk dikelola.

Kris Nugroho (54 Tahun), menantu Begak, menceritakan mengenai sejarah kepemilikan lahan milik almarhum mertuanya. “Dulu itu almarhum mertua saya dibawa dari hulu sana (wilayah di pedalaman hulu sungai Mahakam). Ia beserta 15 keluarga lainnya ditugaskan sebagai petani di desa ini, masing-masing mereka diberikan lahan. Untuk almarhum mertua saya kebetulan dia juga yang jadi kepala rombongannya, diberikan tanah seluas 35 hektar,” terang Kris.

Setelah Begak, Sibon dan Suratin yang menempati Taman Arum, disusul oleh Parmin yang sebelumnya tinggal di Bangun Sari. Pindahannya Parmin ke Taman Arum atas usulan dari Maniok, ayahnya yang sudah memprediksi bahwa di Taman Arum ini ke depannya akan ramai penduduk. “jadi dulu itu kata bapak saya, nanti rame min di Taman Arum pindah kesini saja,” ujar Parmin.

Setelah kedatangan Parmin, pada tahun yang sama rombongan keluarga dari Suparni (73 Tahun) menyusul datang ke Taman Arum, daerah asalnya sama seperti Sibon yaitu Blitar. Datangnya ia ke Taman Arum bersama dengan suami dan ketiga anaknya. Ia mengetahui bahwa di Sumber Sari akan membawa dampak baik bagi perekonomian atas kesaksian dari tetangganya yang lebih dulu datang ke sumber sari “Mbah datang itu *nduk* sama suami ke sini, karena dengar orang-orang bilang di sini itu lahannya masih banyak yang belum digarap, jadi peluang untuk bertani masih luas,” ujar Suparni.

3.3. Pengetahuan dan Kearifan Lokal Menyejarah di Sumber Sari

Saat itu, warga Sumber Sari bergotong royong dalam membangun rumah. Bentuk rumah pada saat itu masih menggunakan atap alang-alang dan dindingnya biasa menggunakan kayu jomok. “Pertama kali datang ke sini Mbah dibantu sama tetangga untuk buat rumah dari daun alang-alang,” ucap Suparni. Serupa dengan kisah Suparni, Parmin juga menceritakan pengalamannya menggunakan rumah dengan atap daun. “Awalnya saya pakai atap yang terbuat dari alang-alang dan diganti setiap dimakan tikus. Dindingnya dari kayu jomok, kalau mau dapat jalan dulu ½ kilo. Kalau kita mau bangun rumah itu kita gotong royong dibantu sama tetangga,” cerita Parmin.

Penggunaan bahan alami menjadi bahan baku dalam membuat rumah dikarenakan pada saat itu kondisi ekonomi masyarakat masih belum memadai untuk membeli material rumah seperti sekarang ini. Selain itu, akses untuk memperoleh barang-barang pun masih sangat sulit, karena kondisi Sumber Sari bahkan Loa Kulu pada 1980 ke bawah masih belum ada pembangunan, kondisi jalanan pun masih jalan setapak. Bahkan untuk jalan darat menuju Samarinda saja belum ada, masih menggunakan jalur laut atau sungai. “Pada 1972, waktu saya pertama kali ke sini belum ada jalur darat, jadi masih menggunakan jalur laut kalau mau ke Samarinda kita harus ke dermaga yang ada di Loa Kulu dulu,” ujar Sandi.

Pembuatan atap yang terbuat dari alang-alang dan dinding dari kayu jomok didapatkan dari pengalaman dan pengetahuan warga suku Dayak yang lebih dulu bermukim di Sumber Sari. Begak sebagai warga suku Dayak yang pertama menempati Taman Arum membagikan pengetahuannya dalam mengelola tumbuhan sekitar untuk menjadi atap dan dinding. Pengetahuan tersebut pun diwariskan secara turun temurun. “Pembuatan atap dari alang-alang bapak saya dapat dari temannya yang orang Dayak yaitu Mbah Begak, dan bapak saya turunkan ke saya,” ujar Parmin.

Setelah Suparni dan keluarganya, warga Blitar lain yang ikut merantau ke Taman Arum ada Sukanto bersama istrinya yang bernama Wijianti pada 1994. Pada saat pemerintah membuat program Transmigrasi ke Pulau Kalimantan, Wijianti dan suaminya tidak berminat dengan alasan pada saat itu ia takut kepada orang-orang Dayak yang ada di Kalimantan. “Dulu itu takut ikut program transmigrasi ke Kalimantan karena takut sama orang Dayak, menurut (sangkaan) kami mereka menyeramkan dan bisa makan orang,” tutur Wijianti.

Namun, ketika orang tua dari Sukanto lebih dulu datang merantau ke Sumber Sari, baru ia bersama suami dan anaknya ikut menyusul dan tinggal di sini pada 1994. Wjianti dan suaminya juga salah satu penduduk yang merasakan kebaikan dari Begak. Setelah kepindahannya ke Taman Arum, ia menggarap lahan milik Begak untuk digunakan bertani. “Pas kami sudah di sini dan berbaur dengan orang Dayak ternyata mereka baik sekali. Jadi lahan yang saya garap itu nyewa sama Mbah Begak sebulannya 400 ribu. Tapi kalau hasil panen lagi jelek, beliau memaklumi dan tidak menuntut upah sewa lahan dengan kami,” ucap Wijianti menceritakan kebaikan hati Begak.

Karena itu, adanya aktivitas pertambangan yang masuk ke wilayah Sumber Sari, bukan hanya mengancam ruang hidup serta perekonomian masyarakat yang mayoritas pertanian, tetapi juga mengancam sejarah dan ikatan tradisi pengetahuan warga lokal. Seperti yang ada selama ini di Sumber Sari, yakni tradisi turun temurun warga lokal maupun yang dibawa oleh para pendatang suku Jawa dan masih bertahan hingga sekarang.

Beberapa tradisi tersebut seperti Bersih Desa atau Sedekah Bumi. Bersih desa merupakan tradisi yang dilakukan warga desa untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rezeki yang didapatkan dari hasil bumi sebagai keberlangsungan hidup masyarakat. Tradisi ini dilakukan setiap setahun sekali, tepatnya di bulan *se/lo*. Maksud dari bulan *se/lo* adalah bulan yang berada di antara hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha.



Gambar 13: Hidangan, sesajen, dan berkat dalam Kegiatan Bersih Desa, Taman Arum, Desa Sumber Sari, 2023

Kegiatan bersih desa dilakukan di Balai Desa dan akan dihadiri oleh para tokoh agama, tokoh adat, dan para petuah dusun setempat. Rangkaian inti dari kegiatan ini adalah pembacaan ekral yang dilakukan di hadapan aneka sesaji yang sudah disiapkan. Ekral adalah doa yang disampaikan dalam bahasa Jawa dan akan dipimpin oleh tetua adat di dusun tersebut. Isi dari ekral yang dibacakan adalah ucapan rasa syukur terhadap Allah SWT serta memberi salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sesaji yang dihidangkan pun berbagai macam jenis serta memiliki makna masing-masing.

Makna dari sesaji yang disiapkan warga desa dijelaskan oleh Mbah Sandi, salah seorang yang sering memimpin pembacaan *ekral* di Dusun Sukodono, Desa Sumber Sari. Ia menyebutkan jenis sesaji yang sering dihidangkan beserta maknanya.

Sesaji berupa beragam jenis hidangan makanan tradisional yang dibuat oleh warga mengandung makna dan harapan. Mereka membuat *sego gurih*, *punar*, *tumpeng* dan *golong* yang mengaitkan kesalehan agama dengan harapan atas kesehatan dan keberkahan tanah agar diberikan kesuburan juga hasil panen yang melimpah.

Mereka juga menyajikan tiga macam bubur mulai dari *bubur merah* dan *putih*, *bubur sepuh*, dan *jenang sengkolo* hingga pisang raja dan *Apam* (kue tradisional) yang ditujukan agar seluruh penduduk mulai dari bayi yang baru lahir hingga para tetua, bahkan bagi warga yang sudah wafat ikut mendapatkan keselamatan dari bala dan marabahaya.



Gambar 14: Perempuan dan Ibu-ibu mempersiapkan makanan dan bahan utama upacara Bersih Desa di dapur warga, 2023

Setelah sesaji tersebut didoakan, makanan akan dibagikan kepada setiap warga desa yang hadir untuk dibawa pulang sebagai *berkat*, yang ikut dinikmati bersama keluarga mereka masing-masing. Legimin, Ketua RT 09, Desa Sumber Sari menjelaskan bahwa sumber utama bahan *sesaji* tersebut berasal dari sawah, kebun, dan pekarangan yang diolah sendiri oleh warga.

Selain bersih desa, terdapat beberapa tradisi lainnya, yaitu di bulan-bulan tertentu terutama bulan Syura warga tidak diperkenankan untuk membuat hajatan karena dipercaya akan membawa malapetaka. Setiap bulan Syura warga biasanya mengadakan “Takir Kelontang” yaitu syukuran yang dilakukan di perempatan jalan dengan harapan memohonkan keselamatan, dan apabila warga ingin membuat hajatan baik pernikahan ataupun khitanan, maka harus ziarah (resik) kubur terlebih dahulu ke tempat sanak keluarga yang telah meninggal.⁵²

⁵²Sejarah Desa Sumber Sari diakses melalui <https://desasumbersari44.wordpress.com/sejarah-desa/> diakses pada 14 Agustus 2024



4. Transformasi dan Model-model Ekonomi Desa Sumber Sari

4.1 Sejarah Kepemilikan Tanah, Ekonomi Pertanian hingga Kolam Tambak

Sejak awal kedatangan masyarakat ke Desa Sumber Sari pada 1971, sebagian besar profesi yang digeluti oleh masyarakat adalah bertani. Dalam sejarah status kepemilikan lahan di desa, biasanya yang memiliki lahan luas pasti mereka yang lebih awal datang membuka desa tersebut. Salah satunya seperti almarhum Begak misalnya, ia merupakan salah satu warga yang berasal dari suku Dayak Benuaq, pendatang dari wilayah hulu, ia dibawa oleh Kerajaan Kutai dan ditugaskan mengelola pertanian untuk memenuhi kebutuhan pangan Kerajaan Kutai pada saat itu, dan ia diberikan tanah tempat berladang seluas 35 hektar oleh kerajaan untuk dikelola.

Kris Nugroho (54 Tahun), menantu Begak, menceritakan mengenai sejarah kepemilikan lahan milik almarhum mertuanya. “Dulu itu almarhum mertua saya dibawa dari hulu sana (wilayah di pedalaman hulu sungai Mahakam), ia beserta 15 keluarga lainnya ditugaskan sebagai petani di desa ini. Masing-masing mereka itu diberikan lahan, untuk almarhum mertua saya kebetulan dia juga yang jadi kepala rombongannya, ia diberikan tanah seluas 35 hektar,” terang Kris.

Saat ini, lahan milik almarhum Begak tersebut sudah diwariskan kepada anak-anaknya, ada juga yang diberikan kepada warga pendatang lainnya seperti yang diceritakan oleh Parmin. Parmin diberi tanah seluas 3 hektar dari pemberian almarhum Begak karena ayahnya ikut membantu pada saat Begak membangun rumah. “Dulu ayah saya itu ikut bantu Mbah Begak bangun rumah. Setelah selesai bangun rumah, ayah saya diberikan tanah seluas 3 hektar,” tutur Parmin. Ia juga menceritakan banyak para pendatang pada 1971 yang membuka lahan dengan main tebang sendiri, mereka membuka dan menebang pohon tanpa membeli lahan yang dibuka, karena dianggap tidak ada yang punya. “Karena itu, yang punya banyak lahan sekarang ini mereka dulu itu yang main tebang sendiri,” tambah Parmin.

Begitu juga cerita yang disampaikan oleh Sandi salah seorang warga dan tetua di Desa Sumber Sari yang menceritakan kondisi awal desa tersebut yang masih dipenuhi dengan pepohonan tinggi hingga belasan meter. Mereka memulai

bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari dengan membuka hutan dan menanaminya tanaman padi gunung. “Mulai datang kesini itu pada 1972 masih hutan semua. Setelah itu, ditanami padi gunung pada 1980” ujar Sandi.

“Jadi pada 1980 itu hutan-hutannya dibuka buat tanam padi gunung, pohon-pohonnya dulu itu masih besar-besar seperti drum terus itu kita tebasi pakai *senso* untuk buka lahan buat tanam padi gunung. Habis panen, lahannya langsung ditanami lagi dengan sayur-sayuran, karena kalau sampai rumputnya banyak dan sampai 3 kali ditanami itu kesuburannya sudah hilang,” jelas Sandi.

Saat ini, Desa Sumber Sari memiliki luas wilayah administrasi seluas 1.416 hektar. Luasan tersebut terdapat 678 hektar diperuntukkan untuk kawasan pangan dan pertanian sawah. Berdasarkan data dari hasil pertanian desa pada 2023 dengan berbagai jenis tanaman seperti tanaman cabai seluas 53 Hektar, bisa menghasilkan panen sebanyak 15 ton per hektar dalam setiap kali panen. Selain itu, jagung seluas 4 hektar bisa mendapatkan 7 ton per hektar dalam setiap kali panen, tomat seluas 9 hektar mendapatkan 4,7 ton per hektar, sawi seluas 15 hektar bisa mendapatkan 43 ton per hektar dan untuk tanaman padi sawah seluas 545 hektar bisa mendapatkan hasil panen sebanyak 20 ton per hektar dalam satu kali panen.⁵³

Jenis dan Hasil Tanaman Pangan Pada Tahun 2023			
1	Cabe	53 Ha	15 Ton/Ha
2	Tomat	9 Ha	4,74 Ton/Ha
3	Sawi	15 Ha	43 Ton/Ha
4	Jagung	4 Ha	7 Ton/Ha
5	Padi Sawah	545 Ha	20 Ton/Ha

Gambar 15: Data tabel jenis dan hasil tanaman pangan, Desa Sumber Sari, 2023

Selain petani, profesi lain di bidang pertanian seperti buruh tani harian juga ada di Desa Sumber Sari. Umi dan Winarti (44 Tahun) contohnya, keduanya buruh tani harian. Mereka bekerja dengan upah 100 ribu mulai dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Umi bekerja sebagai buruh tani harian mulai 2015 dan Winarti bekerja mulai 2022.

⁵³Data Profil Desa Sumber Sari Tahun 2023



Gambar 16: Buruh tani, Umi dan Winarti

Banyak yang memilih bekerja sebagai buruh harian untuk menambah penghasilan. Biasanya mereka yang bekerja sebagai buruh harian apabila hanya memiliki lahan yang kecil ataupun tidak punya lahan sama sekali. “Kalau dihitung-hitung, menanam sayuran sendiri itu modalnya lebih banyak. Ada biaya bibit, pupuk, dan obat. Sedangkan kalau sebagai buruh harian bersihnya sehari bisa dapat 100.000, makan juga sudah ditanggung sama yang manggil,” Ucap Winarti.

Terkait pertambangan, Umi dan Winarti kompak menolak pertambangan di Desa Sumber Sari. Menurut mereka, sumber perekonomian di Sumber Sari mayoritas adalah pertanian yang pastinya akan sangat berdampak pada pertanian di desa tersebut. “Orang tambang itu banyak menawarkan uang segepok untuk membeli lahan, tapi itu kita nikmatinya sebentar saja, mau berapa milyar dalam hitungan detik juga bisa habis,” Ucap Winarti.

“Banyak orang yang terlena dan mau menjual lahannya dengan orang tambang. Ya, itu karena matanya sudah tertutup sama uang, orang itu sudah hilang warasnya, nggak mikir ke depannya kayak gimana,” terang Winarti. “Lebih baik cari hasil yang sedikit tapi berkah, kalau kita mau cari uang, yang penting kita mau usaha *insya Allah* ada saja jalannya,” tambahnya.

Selain itu, Umi juga menceritakan kegiatan sehari-harinya sebelum berangkat kerja sebagai buruh tani harian. Ia memasak dulu untuk bekal suaminya yang bekerja sebagai buruh bangunan dan juga untuk anak-anaknya. Sepulang kerja pada jam 5 sore, ia lanjut untuk masak makan malam keluarganya. “Suami saya kerja bangunan, jadi sebelum kerja saya masak bekal dulu buat dia bawa. Sore, kalau pulang kerja saya masak untuk makan malam, biasa juga kalau pagi saya sekalian masak banyak biar pulang kerja bisa istirahat,” cerita Umi.

Cerita Umi dan Winarti ini memberikan gambaran peran buruh tani perempuan yang juga ikut berperan dan membentuk model ekonomi pertanian dan sayur-mayur di Desa Sumber Sari. Kini model pertanian dan perkebunan juga makin modern, termasuk pengelolaan kebun buah modern, seperti buah melon dan mentimun yang dikelola melalui *green house* atau perkebunan yang menggunakan rumah kaca di RT 4, Desa Sumber Sari. Greenhouse ini dikelola oleh kelompok pemuda bernama Kreasi Anak Muda. Greenhouse baru saja berdiri pada 2023.

Pada tahun pertama atau percobaan pertama ini, greenhouse dikelola secara langsung oleh anak muda agar dapat berkreasi dan ini panen pertama. Namun, hasil timun rusak, sementara melonnya bagus. Saat ini, penyalurannya melalui pesan antar ujar Rendy (22 tahun), salah satu pemuda pengelola Green House di RT 4, Sumber Sari.

“Kemarin banyak yang pesan dari dinas sama rumah sakit ada orang di Samarinda juga,” kata Rendy. “Harga jual per kilonya 40.000, bila ingin mengambil borongan 35.000. Karena timunnya rusak jadi mereka memilih untuk dinikmati sendiri,” tambahnya lagi.

Secara berkala, Green House tersebut akan disterilkan dan dibersihkan, diberi anti jamur sebelum ditanam ulang kembali. “Ini dikelola sama pemuda yang lain juga, gantian agar kelompok tani juga terlibat. Lama pengelolaan green house sampai panen totalnya untuk timun selama 40- 50 hari, kalau melon itu 70 hari. Nanti ditanam lagi akhir atau awal Juli setelah selesai steril,” ungkap Rendy.

Model ekonomi berikutnya yang juga tumbuh di Desa Sumber Sari adalah ekonomi wisata. Puncak Bukit Biru yang berada dalam kawasan administratif RT 9, adalah salah satu dari 7 kawasan wisata andalan di Kutai Kartanegara, ratusan pengunjung disebut ramai saat akhir pekan, per bulan pendapatan dari wisata mencapai sekitar 2,5 juta rupiah. Dedi, Ketua Pokdarwis Dewi Arum menyebutkan pendapatan mereka bahkan pernah hampir mencapai 80 juta rupiah tiap tahunnya, ini belum lagi ditambah dengan objek dan kegiatan wisata lain seperti air terjun, embung, dan wisata sejarah terowongan kereta batu bara zaman Belanda.



Gambar 17-18: *Green house* di Desa Sumber Sari

Sumber Sari juga menyediakan 9 *homestay* bagi para wisatawan yang ingin berkunjung dan menginap. Semua *homestay* tersebut juga dimiliki dan dikelola oleh warga, pengelola sekaligus pemilik *homestay* tersebut di antaranya Legimin, Sunarto, Marno, Parmi, Jamini, dan Seger Wijianto. Penginapan disediakan warga dengan harga per hari sebesar Rp 150.000 sudah termasuk makan 3 kali sehari, dan biaya per sekali makan sebesar Rp 25.000.

Pendapatan yang didapatkan oleh warga per tahun dari penginapan ini kurang lebih sebesar 1.000.000 (satu juta rupiah). Penginapan ini juga sering digunakan untuk kegiatan pelatihan sehingga pendapatan yang didapatkan tidak pasti besarnya, tetapi bersandar pada momen atau kegiatan tertentu.

“Homestay ini sejauh ini ramainya saat kegiatan pelatihan saja seperti kemarin yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Mas Fauzan, Jatim, dan kampus-kampus. Kita juga menyediakan makanan. Kalau KKN biasanya hanya sewa, tidak termasuk makan,” ungkap Legimin.



Gambar 19: *Homestay* milik Parni, Warga RT 09
Dusun Taman Arum, Desa Sumber Sari

Pemilik *homestay* memberikan tarif yang sama dan saat ini tidak menerima pembayaran perbulan.

“Mahasiswa KKN di desa ini biasanya akan membayar per 6 hari dengan biaya perharinya Rp. 150.000” tambah Legimin. Karena telah disediakan bumi perkemahan di puncak bukit biru sehingga *homestay* ini lebih sering digunakan oleh peserta kegiatan pelatihan ataupun penelitian, wisatawan lebih sering memilih menginap menggunakan tenda di puncak bukit biru.



Gambar 20: Petambak ikan, Ardiansyah, Warga RT 06, Desa Sumber Sari

Selain model ekonomi pertanian dan pariwisata, di desa sumber sari juga terdapat model ekonomi perikanan budidaya yaitu tambak. Menurut data profil desa, pada 2023 produksi budidaya ikan air tawar mencapai 126 ton tiap tahun⁵⁴.

Kebanyakan tambak yang ada di Desa Sumber Sari adalah tambak komoditi ikan nila. Ikan nila menjadi pilihan ikan yang dibudidayakan, penghasilan yang didapatkan cukup besar karena para petambak tidak hanya menjual ikan induk saja, tetapi ia juga menjual bibit ikan. Ikan ini nantinya akan dijual ke Loa Kulu. “Ini isinya *calin* (calon indukan) ikan nila karena banyak yang cari bibit, nanti yang ambil orang Loa Kulu sana,” kata Ardiansyah (35 tahun), penambak di RT 4, Desa Sumber Sari.

Penambak lain seperti Saleh Haris (72 tahun), warga RT 1, Desa Sumber sari juga menceritakan bahwa ia dan keluarganya menghasilkan keuntungan kotor hingga 48 juta rupiah tiap panen bibit ikan nila tiba. Saat memanen bibit ikan Nila ukuran 13 milimeter, ia membutuhkan waktu satu bulan setengah. “Saya jual harga 200 rupiah per ekor,” ujarnya. Ia mengaku biasanya terjual hingga 15 ribu ekor bibit dari satu kolam di antara 16 kolam lain miliknya.

Namun keuntungan kotor itu harus dikurangi lagi dengan ongkos pakan. Seperti pengalaman yang disampaikan oleh Ardiansyah. Ia sudah menjadi petambak ikan lebih dulu dari pamannya Saleh Haris sejak 2003.

⁵⁴ Data profil Desa Sumber Sari 2023

Saat mengelola tambak, ibu-ibu dan anak juga ikut berperan, bukan hanya bapak atau pihak laki-laki. “Biasanya saya pagi sampai sore itu kasih pakan ikan 2-3 kali, tapi kalau nggak bisa atau saya turun ke tambak di bawah, (maka) ibu yang akan memberikan pakan,” kata Ardiansyah.

Selain itu, kata Ardiansyah, “Karena ada anak lagi yang baru 2 bulan (usianya), jadi biasanya anak saya yang pertama bantu saya. Umurnya masih 9 tahun, dia yang suka bantu saya dan ibunya menebar pakan ikan waktu sore, karena paginya dia (anak saya) sekolah,” ungkap Ardiansyah.

Mata air yang mengalir dari wilayah Bukit Biru, salah satunya adalah Sungai Pelai, sumber bagi kolam-kolam tambak ikan. Menurut kesaksian Yanto (41 tahun), mata air tersebut bahkan sudah berlangsung sejak 1976. Air sungai sudah dimanfaatkan warga sebagai sumber air utama pada saat pertama kali bermukim. Kini, kondisinya mengalami kekeringan parah, padahal dulunya sungai tersebut airnya sangat melimpah dan dimanfaatkan untuk kebutuhan air bersih seperti minum, mencuci, memasak, mandi dan juga dimanfaatkan sebagai sumber air utama untuk mengairi lahan pertanian (*sawah, sayuran*) dan kolam-kolam pembibitan ikan.



Gambar 21: Sungai Pelai, di Desa Sumber Sari

Yanto (41 Tahun) warga desa Sumber Sari di RT 09 yang juga berprofesi sebagai petambak ikan ini mengungkapkan bahwa “Dulu air di sini melimpah, karena ada perbukitan. Jadi sumber airnya dari bukit itu,” tuturnya.

Kondisi air juga berpengaruh pada kualitas kolam-kolam atau tambak ikan mereka. “kondisi air di sini semakin sulit karena dulu itu ada pengeboran batu bara, ditambah lagi tambang batu bara ilegal yang semakin banyak di atas. Sumber air di sini banyak yang hilang,” ungkap Yanto saat menjelaskan mengapa terjadi krisis air di desanya.



Gambar 22-23: Kekeringan sungai dan waduk di RT 09 Desa Sumber Sari

Kondisi ketersediaan air di desa Sumber Sari kini kian mengkhawatirkan sehingga ditakutkan berimbas lebih parah lagi pada keberlangsungan ekonomi masyarakat. Yanto yang berprofesi sebagai petani dan petambak bibit ikan sangat merasakan langsung daya rusak dari aktivitas pertambangan batu bara tersebut, apalagi kegiatan aktivitas ekonomi yang ia geluti sehari-hari sangat bergantung pada ketersediaan air. Keadaan krisis air dan kekeringan panjang sudah mulai ia rasakan pada November 2023 hingga akhir Februari 2024 lalu. Dampaknya sangat mengenaskan bagi keberlangsungan ekonominya begitu juga warga lainnya karena mereka tidak bisa melakukan budidaya bibit ikan sebagai salah satu sumber penghidupan.

4.2 Ekonomi Musiman, Kolang-kaling dan Kijing

Di sumber Sari, selain padi dan sayur-sayuran, kolang-kaling juga berperan dalam mendongkrak ekonomi musiman masyarakat, tepatnya di RT 04 yang banyak dihuni oleh warga bersuku Kutai. Setiap setahun sekali, khususnya di bulan Ramadan warga setempat selalu pergi ke hutan sekitar untuk mencari kolang-kaling. “Kami cari kolang-kaling ini di hutan liar, biasanya menempuh waktu sampai setengah hari,” ujar Warkidah, perempuan pengolah kolang-kaling musiman.

Kutai dan pengolah kolang-kaling lainnya menjelaskan bahwa kolang-kaling yang sudah dipanen harus melewati beberapa tahapan pengolahan sebelum dijual. Pertama, buah kolang-kaling yang masih utuh bersama kulitnya direbus terlebih dahulu selama kurang lebih satu setengah jam. Setelah itu, kolang-kaling yang sudah direbus dipotong bagian atasnya untuk disungkit atau dikeluarkan isinya. Selesai disungkit, kolang-kaling dicuci dan direndam kembali dengan air bersih. Perendaman dilakukan agar kolang-kaling mengembang. Harga kolang-kaling satu kilogram berkisar antara Rp 13.000-15.000, biasanya dalam sehari Sariah memproduksi kolang-kaling sebanyak ½ pikul. Kolang-kaling yang siap produksi akan diambil tengkulak dan dijual hingga pasar kecamatan Loa Kulu.

Sambil *menyungkit* kolang-kaling, Sariah juga menceritakan keluh kesahnya selama kehadiran tambang di wilayah sekitarnya. Tambang yang masuk di wilayah RT 04 Sumber Sari adalah tambang resmi milik PT. Mega Prima Persada (MPP). Menurutny, semenjak ada aktivitas tambang tersebut telah membawa

berbagai dampak yang merugikan warga RT 4 dan merusak dan mencemari Sungai Kijing. Karena di wilayah ini sumber pengairan untuk pertanian termasuk untuk air mencuci dan merebus kolang-kaling juga berasal dari Sungai kijing.

Sungai ini juga dulunya dijadikan sebagai sumber kehidupan sehari-hari bagi warga. Namun, setelah masuknya PT. MPP yang menambang di hulu Sungai Kijing, menjadikan sungai ini mulai mengering. “Dulu air untuk konsumsi sehari-hari termasuk untuk mengolah kolang-kaling, kami ambilnya dari Sungai kijing. Tapi sekarang setelah Perusahaan MPP masuk untuk menambang, airnya sudah tidak bisa dikonsumsi lagi,” kenang Sariah.



Gambar 24-25: Proses pembuatan kolang-kaling dari buah pohon aren di RT 04 Desa Sumber Sari

“Jadi untuk kebutuhan sehari-hari kami hanya mengharap dari air hujan jika tidak ada bahkan kami sampai membeli air, 1 jerikennya setara 20L dengan harga 8.000. Padahal, dulunya untuk air kami gratis dan tinggal ambil saja di Sungai Kijing,” tambah Jumansyah, anak Sariah yang ikut membantu mengolah kolangkaling.

Jumansyah dan Sariah menceritakan bahwa nama Sungai kijing, mulanya karena sungai ini banyak ditemukan hewan sejenis kerang yang dalam Bahasa Kutai yang biasa disebut “Kijing”. Karena itu, masyarakat kemudian menyebutnya sebagai Sungai kijing dan nama ini melekat hingga sekarang. Kijing adalah penanda kesehatan sungai dan kini kijing tak ditemukan lagi karena rusak dan tercemarnya sungai di RT 4 Desa Sumber Sari ini.

4.3 Disrupsi Ekonomi Pertambangan

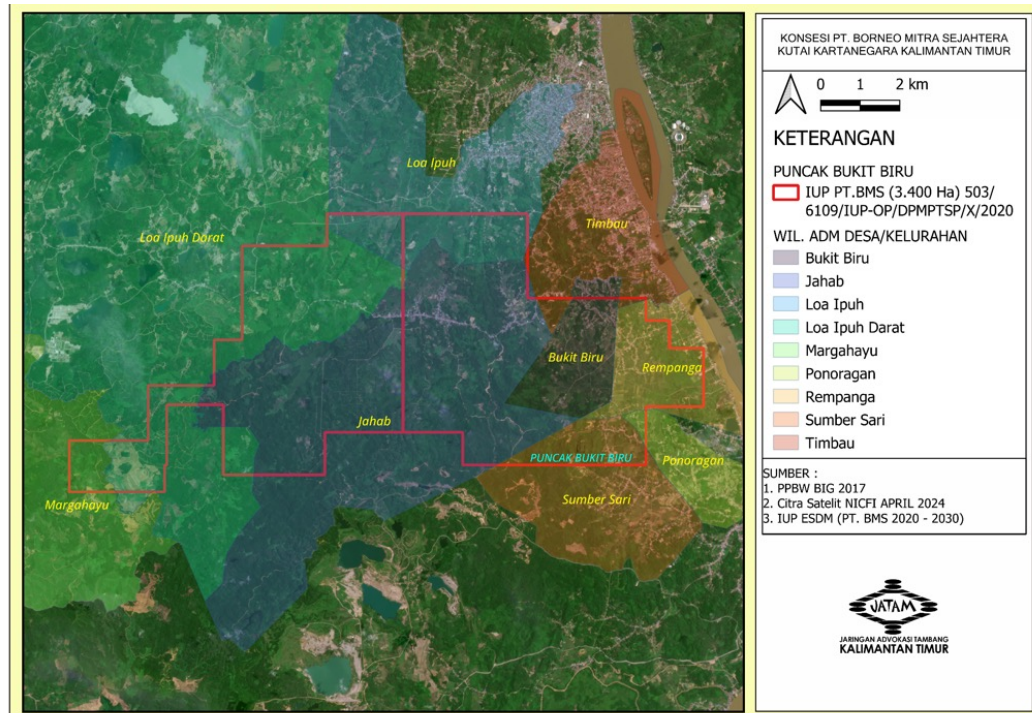
Kelangsungan ekonomi pertanian dan perikanan terdisrupsi saat model ekonomi pertambangan yang didesak dari luar kemudian masuk ke Desa Sumber Sari. Sejak 2009, PT. Borneo Mitra Sejahtera (PT BMS) pertama kali mendapatkan kuasa pertambangannya. Menurut data Minerba One Data Indonesia (MODI), ESDM PT BMS merupakan perusahaan swasta yang beralamat di Karang Anyar Permai 55 Blok. A 1, No. 22-23, Jl. Karang Anyar Raya No. 55, RT. 001 , RW. 013, Kel Karang Anyar, Kec Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat.

Dalam dokumen MODI ESDM tercatat nama Djawi Santoso yang menjabat sebagai direktur utama, dan Ie Tjoeng Benyamin M sebagai komisaris. PT BMS mulai memproduksi batu bara sejak 2012 dan perusahaan ini kembali mendapat izin perpanjangan sejak 2020 hingga 2030 dengan target produksi 224,331 ton hingga dengan 296,445 Ton per tahun.

Perusahaan ini memiliki luas konsesi seluas 3.411 hektar. Menurut AMDAL lokasi penambangannya berada di tiga tempat, yaitu Kelurahan Bukit Biru, Kelurahan Jahab, (Kecamatan Tenggarong), Desa Loa Sumber, setelah pemekaran pada 2011-2012 menjadi Desa Sumber Sari dan berdampak pada 3 RT yakni di RT 09, RT 08, RT 05 dengan jumlah populasi yang diklaim akan tertimpa dampak langsung berkisar 841 warga atau 25% dari jumlah penduduk Desa Sumber Sari.

Konsesi seluas 3.411 hektar milik perusahaan PT BMS hanya membutuhkan tenaga kerja sebanyak 80 orang saja, mulai dari tenaga teknis hingga tenaga operasional.

Karakteristik ekonomi pertambangan yang minim modal, padat untung, tetapi tidak menyerap tenaga kerja besar tidak sebanding dengan daya rusak yang akan di tinggalkan jika perusahaan ini beroperasi di wilayah Desa Sumber Sari.



Gambar 26: Peta tambang PT. BMS yang mengkapling wilayah produktif warga

Dalam rencana operasinya, PT. BMS melakukan kegiatan penambangan di areal potensi yang akan ditambang seluas kurang lebih 82,85 hektar. Jika operasi produksi ini berjalan, maka perusahaan PT. BMS akan meninggalkan 31 lubang bekas galian tambang.

Tidak hanya terancam oleh operasi pertambangan yang memiliki izin seperti PT. BMS yang berdampak pada keseluruhan Desa Sumber Sari atau PT Mega Prima Persada (PT. MPP) yang beririsan dan berdampak pada wilayah RT 4, Desa Sumber Sari juga menjadi sasaran operasi pertambangan batu bara tanpa izin atau ilegal.



Gambar 27: Lokasi tambang ilegal di hulu Sungai Pelai dengan limbah mengalir langsung ke tubuh sungai



Gambar 28: Foto udara aktivitas tambang ilegal di Desa Sumber Sari

Berdasarkan hasil investigasi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) setelah menindaklanjuti laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur pada 09 Desember 2022 ditemukan bukaan lahan tambang ilegal pada koordinat 0°30.753'LS-116°58,435'BT di Desa Sumber Sari dengan tumpukan batu bara sejumlah ± 10 tumpukan tanpa adanya pengelolaan lingkungan (pengendalian pencemaran air) pada kegiatan pertambangan tersebut.

Dari hasil *overlay* dengan Perda Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013-2033 lokasi pertambangan ilegal di desa Sumber Sari ini berada di kawasan Perkebunan. Temuan BPPHLHK juga menemukan nama sejumlah aktor pemilik atau pemodal kegiatan batu bara ilegal tersebut yaitu H. Hakim, H. Amin, Riswan, dan Umai.



Gambar 29: Foto hulu Sungai Pelai dengan debit air yang semakin mengecil dan keruh

Dampak pertambangan yang dirasakan warga Sumber Sari dan sekitarnya yaitu aliran air Sungai (Pelai) pada bagian hulu tercemar oleh aktivitas tambang ilegal dan menyebabkan hilir sungai juga tercemar. Sungai tersebut merupakan sumber air yang digunakan oleh warga untuk pengairan sawah dan kolam ikan. Tercemarnya air tersebut menyebabkan gagal panen dan ternak ikan mati. Status jalan yang dilewati pengangkutan batu bara ilegal ini berlangsung sepanjang kurang lebih 4 kilometer. Pengangkutan juga melalui jalan hauling milik PT. Megaprima Persada (MPP) yang selanjutnya menuju akses jalan Desa Loh Sumber.

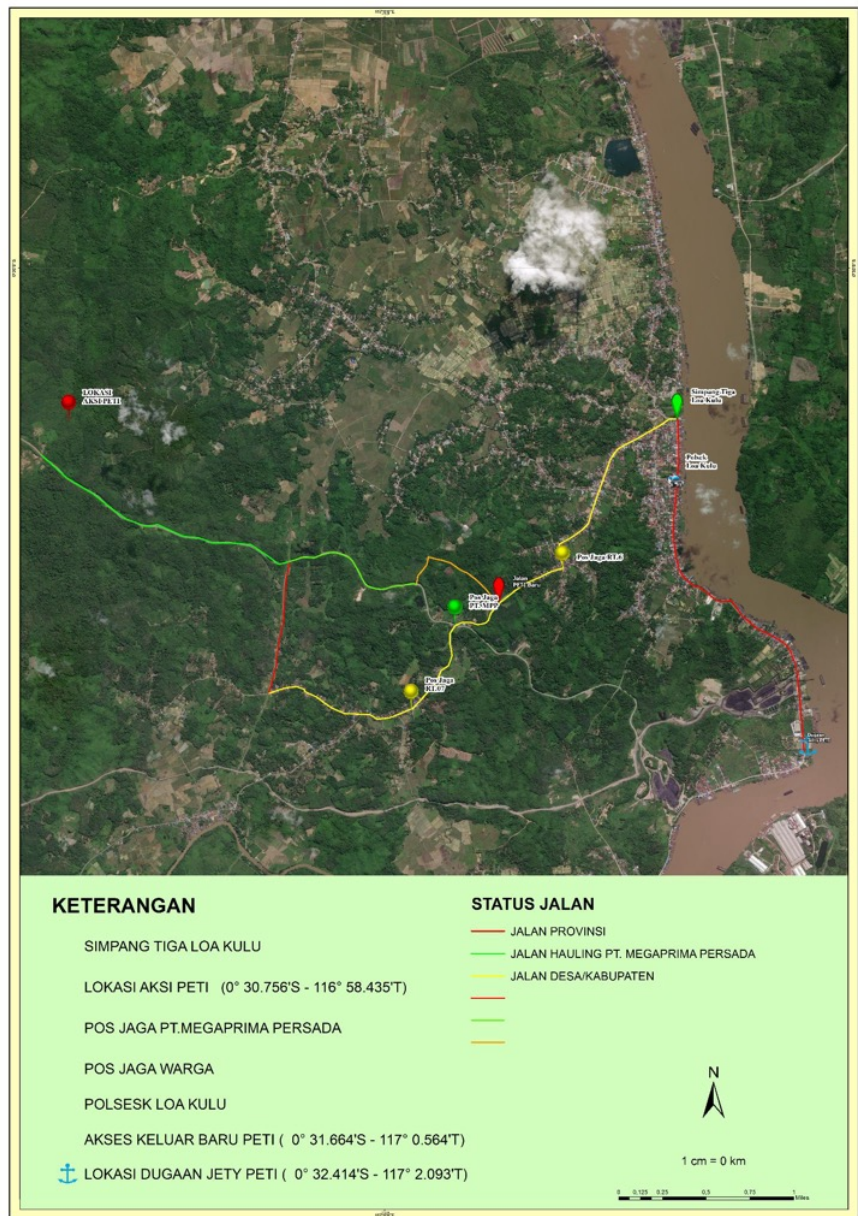
Setelah itu, melalui 5,5 kilometer jalan berstatus milik kabupaten dan 3,6 kilometer jalan berstatus milik provinsi menuju wilayah jetty/pelabuhan ilegal di Jalan Yos Sudarso, RT 18, Desa Loa Kulu Kota.



Gambar 30: Foto udara lokasi penumpukan batu bara ilegal di Kecamatan Loa Kulu Kota

Aktivitas penambangan tanpa izin ini berada di wilayah administrasi Desa Sumber Sari sebagai wilayah utama operasi pengerukannya yang juga beririsan dengan wilayah konsesi PT. Multi Harapan Utama (MHU), bersebelahan dengan wilayah Desa Loh Sumber yang kampungnya digunakan sebagai akses *hauling* menuju pelabuhan. Berjarak sekitar 7 Km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, Desa Sumber Sari dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor hanya dengan waktu $\pm$ 20 Menit dari pusat Kota Tenggarong.

Beragam cara dan modus dilakukan oleh para komplotan penambang ilegal agar aktivitas mereka bisa berjalan dengan mulus. Menjanjikan uang *fee* debu, pekerjaan, hingga perbaikan jalan akan mereka berikan kepada warga. Bahkan politik pecah belah pun tak segan mereka lakukan, agar tujuan mereka tetap tercapai. Warga yang sudah muak dengan janji dan tidak mudah percaya dengan yang mereka ucapkan, belajar dari pengalaman dengan perusahaan resmi yang jelas aturan dan rencana kerjanya diatur dalam Peraturan juga tetap dilanggar. “Saya itu diajak untuk terlibat, dan dimintakan izin agar warga bisa menerima, tapi saya katakan tidak. Sebab yang resmi saja ada nama usahanya tetap melanggar apalagi yang koridoran seperti ini, jaminan apa yang bisa warga pegang,” terang Supono (45 Tahun), warga Dusun Merangan, Desa Loa Sumber, mengingat pertemuannya dengan kelompok penambang ilegal.



Gambar 31: Peta rute hauling tambang ilegal dari lokasi keruk hingga jetty penumpukan batu bara

Seperti tak hilang akal, para penambang ilegal ini juga mengubah kendaraan mereka guna memuat batu bara menuju lokasi penumpukan dengan menggunakan Pickup L300. Sebab warga terus menolak janji dan iming-iming yang mereka tawarkan, karena warga khawatir dengan dampak yang akan terjadi seperti jalan rusak dan berdebu. Namun modus ini juga ditentang oleh warga, sebab mereka sadar bahwa setiap aktivitas pengangkutan batu bara, harus melewati jalan khusus dan bukan jalan umum milik warga. Akibatnya, cara memuat batu bara menggunakan pickup L300 juga berhasil digagalkan oleh warga⁵⁵.

⁵⁵Dokumentasi dan Wawancara Warga desa Sumber Sari, Legimin pada 12 Mei 2024



Gambar 32 dan 33: Pickup L300 yang digunakan untuk memuat batu bara menuju lokasi penumpukan



5. Dinamika Perlawanan Masyarakat dan Perempuan Sumber Sari

5.1 Membendung Lewat Pilkades dan RT

Pemilihan Kepala Desa sebagai salah satu wujud pembentukan elite formal di Desa Sumber Sari dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan budaya yang unik dan berbeda di tiap tempat. Di Desa Sumber Sari, pemilihan kepala desa yang terjadi pada 2012 dilingkupi oleh kondisi desa yang sedang mengalami dinamika penolakan masuknya perusahaan pertambangan batu bara milik PT. Borneo Mitra Sejahtera (BMS).

Masyarakat saat itu, memilih para calon yang mengajukan diri sebagai kepala desa untuk menandatangani surat komitmen yang dibuat oleh masyarakat atau kontrak politik terhadap para calon. Salah satu poin dalam surat kesepakatan itu, apabila si calon terpilih, menyatakan sikap dengan tegas menolak masuknya perusahaan pertambangan batu bara beroperasi di Desa Sumber Sari. Seperti yang diceritakan oleh Legimin (52 tahun) bahwa “Di sini dulu pas pemilihan kepala desa itu warga buat surat komitmen. Jadi kalau calonnya berani menandatangani, warga juga berani memilihnya untuk menjadi kades di sini. Jadi Pak Tarno (kepala desa saat ini) itu dulu menang karena dia waktu itu berani menandatangani surat komitmen yang warga buat itu,” tutur Legimin.

Selain pemilihan kepala desa, di tingkat RT seperti pada RT 09 tahun 2013 misalnya, Afid, warga RT 09 menceritakan cerita pengangkatan Legimin sebagai ketua RT 09. Warga percaya terhadap Legimin karena saat periode sebelumnya, ia menjabat sebagai wakil ketua RT 09. Menurut Afid, Legimin kala itu sudah sangat gigih membantu warga, bahkan Legimin sampai diteror oleh pihak perusahaan karena melindungi wilayah RT 09 yang akan ditambang. Atas kegigihan itu, Legimin hingga saat ini sudah menjabat selama 12 tahun karena kepercayaan warga terhadapnya. “Di Dusun Taman Arum ini, warga sangat percaya sama Pak Legimin karena orang tahu bagaimana sikap Pak Legimin sejak awal masuk perusahaan ke desa ini. Dia bahkan sampai didatangi dan diancam mau dibunuh sama orang perusahaan, tapi dia tetap kokoh menolak. Karena itu, sampai sekarang orang sangat percaya sama dia,” terang Afid (42 Tahun) menceritakan sosok Legimin.

Tidak hanya berpengaruh pada pembentukan elite formal, dinamika politik-ekonomi pertambangan juga berpengaruh pada muncul dan terbentuknya organisasi masyarakat di Desa Sumber Sari. Seperti contohnya munculnya Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Desa Sumber Sari, Taman Arum pada 2013.

“Dulu kegiatan Pokdarwis ini sempat vakum selama 8 tahun. Lalu saya beserta warga punya inisiatif lagi untuk mengaktifkan kegiatan Pokdarwis ini. Tujuannya agar penambangan di Bukit Biru itu dihentikan karena kalau orang tahu desa ini Desa Wisata, mereka juga pasti berpikir untuk (mau) menambang,” tutur Dedi, Ketua Pokdarwis, Taman Arum.

Berbagai kegiatan dilakukan oleh anggota kelompok, seperti membangun kembali sarana wisata, membuat pos ronda jaga malam di pintu wisata, dan meningkatkan promosi wisata lewat media sosial desa agar menarik banyak pengunjung datang. Selain itu, sebagai upaya untuk mencegah adanya aktivitas penambangan di wilayah wisata bukit biru.

Wadah pertukaran informasi antarwarga lainnya adalah kala yasinan, tiap jum’at tiba. “Biasanya kita ngobrolin soal tambang ini juga pas yasinan malam Jum’at. Warga saling cerita, ada yang kasih saran bagaimana caranya agar desa tidak jadi ditambang. Ada juga yang hanya mendengarkan saja, tapi walaupun dia diam, tetap saja semua di sini kompak kalau menolak tambang,” terang Suparnowo, anggota Yasinan, warga RT 09 Desa Sumber Sari.

5.2 Aksi Protes dan Perlawanan Perempuan dari Sumber Sari hingga Merangan

Tahun 2009 adalah awal mula perizinan eksplorasi aktivitas pertambangan batu bara di Sumber Sari, yaitu masuknya perusahaan PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS). Namun, warga baru mengetahui kegiatan pertambangan tersebut beroperasi pada sekitar 2011.

Masuknya PT BMS ke Sumber Sari saat itu memecah Masyarakat menjadi dua kubu, yaitu kubu yang menyetujui dilakukannya pertambangan dan kubu yang menolak. Menurut keterangan Legimin, ketua RT 9 yang wilayahnya masuk dalam konsesi pertambangan PT BMS. Saat itu, RT 9 dari total 100 KK ada 40 KK yang menyetujui masuknya pertambangan, bahkan para pekerja dari PT BMS sudah mengontrak beberapa rumah di Sumber Sari selama 5 tahun untuk melakukan prospeksi dan eksplorasi.

Salah satu rumah yang dikontrakkan adalah milik anak dari Suparni (73 Tahun) warga RT 09, “Pekerjanya yang mau menambang itu ada namanya Pak Niko dan Pak Yoseph, mereka tidur di rumah ini, dari tahun 2008-2012 rumah ini dikontrak sama mereka,” cerita Suparni.

Beberapa warga yang menerima pertambangan adalah mereka yang bekerja di PT. BMS dan warga yang sudah dijanjikan akan diberikan ganti rugi. Namun, sikap penerimaan tersebut tidak bertahan lama, karena pekerja lokal yang sudah dikontrak, belum sampai satu tahun sudah di-PHK, atau menerima pemberhentian kerja. Belum lagi ganti rugi yang dijanjikan kepada warga tidak ditepati. “Waktu BMS masuk itu pekerjaannya masih banyak orang Sumber Sari, mereka dikontrak 1 tahun, tapi belum 1 tahun sudah di PHK. Karena itu, warga berontak dan mulai dari situ menolak terus kalau ada tambang yang masuk,” ujar Legimin.

Bentuk pendekatan lain yang dilakukan oleh PT BMS yaitu dengan menawarkan janji pemasangan fasilitas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) gratis kepada warga. Namun, warga RT 9 sepakat untuk menolak. Adapun warga yang menerima tawaran tersebut sebagian berasal dari RT 10, Sumber Sari yang secara geografis wilayahnya tidak akan terdampak langsung dari aktivitas pertambangan.



Gambar 34:Alat berat mulai memasuki Desa Sumber Sari dan merusak lahan warga

“Dulu bahkan Perusahaan BMS mau pasang PDAM gratis dengan bekerja sama dengan orang PDAM. Namun, semua warga di RT 9 nggak ada yang menerima. Yang banyak memasang itu di RT 10,” terang Legimin.

Ada pula warga Sumber Sari yang bekerja dengan PT BMS, ia diceritakan pernah menjabat sebagai Humas dari perusahaan batu bara ini. Ia tidak disukai oleh warga Sumber Sari. “Uang ganti rugi warga saja suka dikorupsi sama dia,” ucap Suparni mengenai sosok ini.

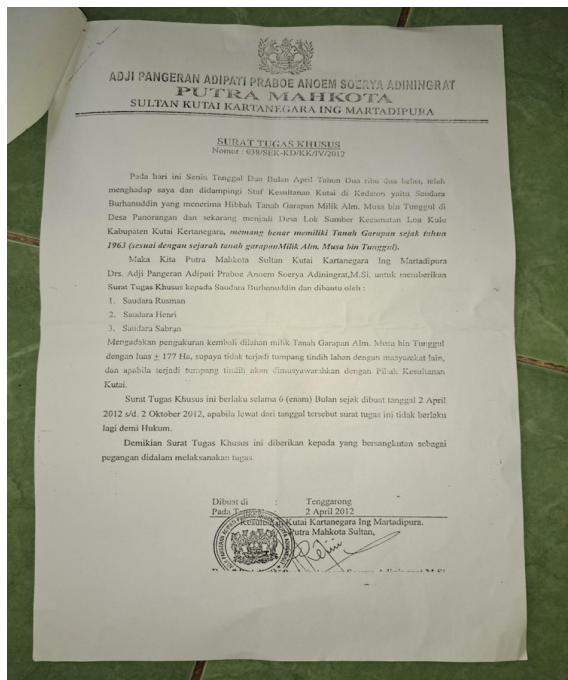
Suparni juga menyampaikan bagaimana peran sosok tetangganya itu. Karena menjadi aktor yang terlibat mendukung pertambangan di Sumber Sari, warga memberikan *sanksi sosial* kepadanya, ia dikucilkan oleh warga setempat. “Dia meninggal itu nggak ada yang melayat karena tidak disenangi warga, tetangga sebelah rumahnya saja nggak ada yang datang,” tambah Suparni.

Harmoni sosial yang rusak dan potensi konflik juga muncul lewat masalah tumpang tindih lahan dan klaim kepemilikan pada tahun-tahun awal kehadiran tambang pada 2012. Saat PT BMS mengeluarkan surat pemberitahuan yang melampirkan informasi bahwa konsesi tambang mereka berada pada tanah yang diklaim milik seseorang yang terhubung dengan Kesultanan Kutai Kartanegara seluas ±177 hektar, hal ini membuat Legimin, ketua RT 09 Desa Sumber Sari kaget. Sepanjang pengetahuannya, tanah-tanah di sana sudah bersertifikat dan dimiliki para petani jauh sebelum tambang datang.⁵⁶

Akhirnya, karena kecewa, warga bersatu untuk menolak PT BMS yang akan melakukan pertambangan di wilayah mereka. Perlawanan warga terhadap pertambangan dilakukan dengan sejumlah cara. Mereka belajar pengalaman perusakan di desa lain seperti merekam kondisi Desa Mulawarman di Kecamatan Tenggarong Seberang yang sudah terdampak operasi pertambangan untuk diperlihatkan kepada warga di Desa Sumber Sari.

“Video kondisi Desa Mulawarman sayalihatkan ke warga di Balai menggunakan proyektor. Setelah itu, kebetulan ada musibah tanah longsor akibat dari pertambangan CV Sulistia, jadi saya ajak warga ke sana buat liat langsung kerugian yang dihasilkan dari tambang. Saya bilang rumahmu nanti jadi kayak gini kalau kalian terima tambang. Makanya mereka nggak mau dan langsung menolak semua,” ujar Kris (54 tahun), warga RT 09 Desa Sumber Sari.

⁵⁶Surat tugas khusus PT BMS No 038/SEK-KD/KK/IV/2012



Gambar 35: Foto surat tugas khusus PT BMS No 038/SEK-KD/KK/IV/2012.

Kris juga dibantu Legimin, ketua RT 09. Mereka mengumpulkan 23 sertifikat milik warga untuk diamankan di Bank BPD agar tidak ada sertifikat tanah yang jatuh ke PT BMS. “Cuma saya sama pak RT yang kumpulkan 23 sertifikat tanah untuk diamankan di safety box dan disimpan di Bank BPD. Karena kalau disimpan di sana ga akan ada yang berani ambil, kalau di rumahnya kan bisa aja mereka beda pendapat sama anggota keluarga yang lain dan akhirnya bisa saja sertifikatnya dijual ke PT BMS, jadi ya kami yang amankan,” tambah Kris.

Saat Desa Sumber Sari masih menjadi bagian dari Desa Loh Sumber, Kepala Desanya menyetujui adanya pertambangan. Karena itu, setelah pemekaran menjadi Desa Sumber Sari dan pemilihan Kepala Desa baru, Legimin dan kawan-kawannya membawa Kepala Desa terpilih, Soekarno ke suatu tempat agar memihak mereka untuk menolak pertambangan.

Masalah juga timbul akibat terbitnya Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari PT BMS yang berisi tanda tangan warga Sumber Sari tanpa sepengetahuan mereka. Dalam AMDAL tersebut, dikatakan bahwa konsesi PT BMS berada di lahan kosong dan bukan daerah pemukiman.

Rita Widyasari yang pada saat itu masih menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pun turut serta menandatangani dan membenarkan informasi di dalam AMDAL tersebut. “Warga kaget kok bisa tanda tangan kita ada di dalam AMDAL. Padahal kita sama sekali nggak ada tanda tangani AMDAL itu.” “Nggak tahu BMS dapat dari mana, padahal yang menyetujui itu bukan desa sini tapi desa sebelah, Desa Jahab. Lebih kagetnya lagi di AMDAL dikatakan kalau yang masuk konsesi bukan wilayah pemukiman,” terang Legimin.



Gambar 36: Foto Rita Widyasari bersama Kepala Desa Sumber Sari, Soekarni saat mengunjungi Desa, Agustus 2024

Kris juga mengingat betapa sulitnya akses dan transparansi atas informasi. Masyarakat yang ingin mendapatkan informasi penambangan seperti Dokumen AMDAL juga tidak mudah memperolehnya. Pengalaman ini dirasakan oleh Kris “Saya tahu kalau dulu Badan Lingkungan Hidup (BLHD) ada di Kukar, tapi BLHD nggak mau kasih dokumen AMDAL-nya. Saya bilang berarti sampean itu kerja sama dengan mereka, kalau begitu sampean musuh saya. Jadi mulai tahun 2007 mereka sudah ngebor di sini sampai 2012.

Kris Nugroho yang mewakili pihak warga bertemu dengan PT BMS, meminta agar rencana penambangan tersebut dapat dibatalkan, sebab di sana banyak pemukiman dan warga yang berusaha sebagai petani “Iya, saya ketemu langsung bosnya itu, Pak Djawi Santoso sama Pak Beny (IE Tjoeng Benyamin M). Saya ketemu di Jakarta di kantornya BMS, terus yang amankan itu dari pihak Kepolisiannya Pak Mathius Salempang sama Pak Tito di Hotel Jakarta Kuningan,” ujar Kris.

Perlawanan warga mulai memuncak sejak alat berat tambang mulai masuk ke Desa Sumber Sari. Namun, rencana tersebut dihadang oleh warga dengan memukul alat berat menggunakan parang yang mengakibatkan kuncinya patah. Dari kejadian tersebut, warga disalahkan oleh pihak BMS dan dilaporkan ke Polisi Resor Kutai Kartanegara (Polres) sebagai perusakan alat berat. Padahal menurut Legimin, Perusahaanlah yang bersalah, karena telah merusak kebun bayam salah satu warga yang akan panen. Dari kesaksian Legimin, Polres saat itu memilih tidak melanjutkan perkara tersebut.

Intimidasi pun sering didapatkan dari preman PT. BMS kala itu, bahkan diancam akan dilaporkan ke polisi jika warga tidak memberikan tanahnya. Namun warga tetap tak gentar dengan ancaman yang diberikan. “Humas BMS itu mendatangi setiap rumah untuk meminta tanah warga dijual ke BMS, bahkan premannya. Ngeri betul ancam kita mau dipenjarakan kalau tanahnya nggak mau dijual,” Ujar Suprpto warga RT 09

Warga berjuang sendiri bahkan sampai menemui Satgas Pertanian dengan menyusul datang ke Kecamatan Samboja untuk melaporkan masalah di desa mereka. “Sebelum kita kerja sama dengan Jatam, perjuangan kita itu hanya sebatas komunikasi dengan pemerintah dan aparat penegak hukum. Tapi ya tidak direspons. Bahkan kita sampai ke Satgas Pertanian yang pada saat itu harus didatangi ke Samboja. Kita datang ke Samboja buat minta tanda tangan dukungan menolak tambang,” ujar Dedi, warga RT 05 Desa Sumber Sari.



Gambar 37: Foto aksi warga Desa Sumber Sari pada tahun 2011 saat mengadang alat berat milik perusahaan Borneo Mitra Sejahtera (BMS) mencoba memasuki desa

Berbagai perlawanan warga akhirnya menyebabkan kegiatan pertambangan batu bara PT BMS berhenti sementara pada 2012. Warga dapat bernapas lega sesaat. Namun, celakanya, pada 2024, perusahaan batu bara ini tampak bersiap-siap akan kembali beroperasi hingga 2030.

5.3 Posko Tolak Tambang dan Blokade Jalan di Merangan

Keresahan yang dialami warga atas kehadiran tambang batu bara ilegal juga terjadi di Dusun Merangan, Kelurahan Loh Sumber, desa tetangga Sumber Sari di Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejak Juli 2022 hingga saat ini juga ikut diresahkan oleh pengangkutan batu bara dari Tambang ilegal yang menggunakan jalan umum milik warga.

Selama kurang lebih empat bulan sejak Juli hingga Oktober 2022, warga atas kesadaran dan inisiatif sendiri untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Selain itu, warga juga melakukan jaga malam setiap harinya yang diatur dalam jadwal piket berganti setiap malamnya agar tambang tidak dapat melintas di pemukiman warga. Warga RT 07 Dusun Merangan dan RT 06 Lubang Batu, bergantian berada di setiap pos jaga untuk mencegah jalan umum milik warga dilintasi oleh hauling batu bara ilegal.



Gambar 38: Foto suasana jaga malam warga Merangan menghadang hauling tambang ilegal di “Mabes” sebutan untuk posko portal warga

Pemasangan spanduk besar penolakan juga dipasang pada beberapa titik jalan yang sebelumnya dilalui oleh Hauling Tambang ilegal. Saat situasi genting, warga bersitegang dengan para penambang ilegal yang memaksa untuk melewati pos jaga yang didirikan oleh warga yang menolak tambang ilegal. Para penambang ilegal juga mengancam dengan membawa sejumlah orang yang diduga adalah preman bayaran untuk mengamankan proses jalan hauling. Warga juga menggunakan TOA atau Speaker masjid hingga kentungan untuk memanggil warga lain agar dapat bersatu menghalau pengangkutan batu bara ini.

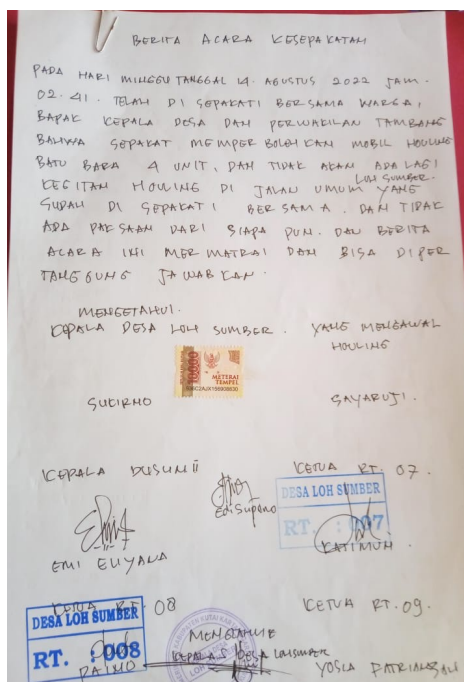
Dampak dari kehadiran tambang ilegal ini menyebabkan fasilitas umum jalan warga menjadi rusak, debu, bahkan jalan licin berlumpur saat turun hujan, tidak hanya itu kebisingan karena mereka melintas di tengah pemukiman warga saat jam istirahat malam warga. Setidaknya lebih dari 10 Truk bermuatan batu bara secara maraton berlalu lalang melewati jalan kampung Dusun Merangan. Hal lainnya adalah yang paling dirasakan oleh warga hilangnya kerukunan antar warga disebabkan tambang ilegal ini antara warga yang menolak dan beberapa warga yang menerima. Kerukunan dan keamanan yang sebelumnya dinikmati warga kini terusik karena kehadiran tambang ilegal.



Gambar 39: Salah satu akses jalan hauling tambang ilegal menuju jalan umum lokasi lobang batu, Desa Loh sumber

Akhir dari rute hauling batu bara yang digali dari Sumber Sari dan diangkut melalui jalan warga di dusun Merangan tersebut berakhir pada sejumlah Jetty yang juga diduga kuat ilegal tanpa izin. Pelabuhan penadah batu bara ilegal ini tersebar dari wilayah Rempanga hingga Tanjung Berhala Loa Kulu. Berdasarkan data sebaran TUKS dan TERSUS yang dimiliki JATAM Kaltim lewat permohonan informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Perhubungan, diperkuat dengan pemantauan lapangan sejak Agustus 2022 hingga Juli 2024, sedikitnya terdapat 5 Titik penumpukan batu bara ilegal berjejer aman dalam melakukan aktivitasnya, tanpa ada rambu keselamatan juga kesehatan dan tanpa peralatan kerja yang memadai, karena hanya sebatas pagar penghalang seng setinggi tidak lebih dari 2 meter.

Mengutip tulisan dan hasil wawancara media dengan Kepala Lalu Lintas dan Angkutan Laut KSOP Kelas II Samarinda, Zulqadri Edy mengatakan “bahwa tidak ada izin TUKS yang mereka keluarkan baru-baru ini. Jetty yang berada di Desa Rempanga Kecamatan Loa Kulu atau tepatnya di wilayah Pal 9 adalah salah satunya. Bisa dipastikan tidak ada TUKS resmi di wilayah itu (Pal 9). Kalau ada kegiatan bongkar muat (sisi laut) itu dilarang.”⁵⁷



Gambar 40: Foto berita acara kesepakatan menolak hauling

Pada 14 Agustus 2022 warga Dusun Merangan mendesak Kepala Desa Loh Sumber untuk memberikan pernyataan tertulis tentang penolakan Tambang ilegal yang menggunakan jalan fasilitas umum milik warga. Karena sebelumnya sempat terjadi gesekan antara para penambang ilegal beserta preman yang memaksa dengan cara apa pun agar bisa melewati pos jaga yang dimiliki oleh warga. Warga kemudian meminta Kades bersikap maka keluarlah Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Loh sumber atas nama saudara Sukirno dengan Materai 10.000 dan sejumlah perwakilan Ketua RT.

⁵⁷ Jurnalborneo.com. 2023. “TUKS Ilegal jadi tempat penumpukan batu bara di jonggon, KSOP Samarinda tidak punya wewenang lakukan penindakan” diakses melalui TUKS Ilegal Jadi Tempat Penumpukan Batu Bara di Jonggon, KSOP Samarinda Tidak Punya Wewenang Lakukan Penindakan - Jurnal Borneo, pada 2 Juni 2024

Hingga saat ini, warga Dusun Merangan masih terus piket jaga di posko tolak tambang dan memblokir jalan umum. Jika ada pengangkutan batu bara ilegal melewati jalan, perjuangan dan perlawanan mereka masih terus berlangsung.

5.4 Perempuan Melawan, Jadi “Intel” sampai Turun ke Jalan Desa

Tidak hanya laki-laki, kelompok perempuan juga ada dalam pusaran dinamika ini. Beberapa anggota Kelompok Wanita Tani seperti Sumi, perempuan petani di RT 09, menceritakan bagaimana ia berperan sebagai “intel” warga tolak tambang. Hal ini ia lakukan karena letak rumahnya berada tepat di pinggir jalan di RT 09 yang posisinya strategis untuk memantau lalu lintas tambang ilegal. Sumi menjadi informan bagi suaminya ketika ada hal-hal mencurigakan mengenai tambang pada saat suaminya sedang berada di kebun. Informasi Sumi bermanfaat bagi perlawanan warga kala itu.

Di tempat lain, di dusun Merangan, Desa Loa Sumber, para perempuan dan ibu-ibu juga turut serta dalam perjuangan menolak tambang, mereka bahkan secara langsung ikut menghadang truk-truk pengangkut batu bara ilegal yang melintasi jalan desa. Jumini (46 Tahun) salah satu warga Dusun Merangan yang dikenal vokal dan berani dalam aksi pengadangan truk batu bara ilegal menceritakan alasannya ikut turut serta dalam aksi tersebut. Ia kesal dengan truk-truk batu bara ilegal yang selalu melewati jalan pemukiman di Dusun Merangan. Ia dan ibu-ibu lainnya ikut turun melakukan aksi pengadangan truk batu bara ilegal yang melintas.



Gambar 41: Foto Jumini, salah satu ibu-ibu yang ikut menghadang truk batu bara

“Saya ikut turun aksi karena saya sudah capek lihat tambang ‘koridoran’ (**sebutan lokal atas tambang ilegal**) ini tiap hari memaksa mau lewat. Padahal, di posko, (mabes sebutan lokal warga atas posko tolak tambang) itu sudah dijaga sama warga secara bergiliran, tapi mobil-mobil ini tetap memaksa mau lewat. Kita juga yang di rumah ini merasa terganggu karena suaranya ribut. Jadi karena saya juga sudah kesal, kasihan lihat suami cape-cape jaga di pos, tapi mereka masih nekat mau lewat, ya sudah kita ikut turun aksi juga,” ucap Jumini.

Selain Jumini, perempuan dan ibu-ibu lainnya juga merasakan hal yang sama, seperti yang diungkapkan oleh Suhartini (48 Tahun). Truk-truk batu bara tersebut sering melintas di depan rumahnya yang tepat berada di pinggir jalan menjadi alasan kenapa ia ikut turun aksi bersama ibu-ibu lainnya. “Alasan kenapa ibu-ibu ikut turun aksi biar mereka jera. Tahu sendiri kan gimana kalau ibu-ibu ngomong suka ceplas-ceplos. Saya kasih tahu itu sopirnya kenapa lewat sini kan sudah ada jalannya sendiri,” ucap Sunarti.

5.5 Pelaporan Hukum hingga Menggalang Petisi Penolakan

Pada 2021, ketenangan warga Sumber Sari kembali terusik dengan masuknya tambang batu bara koridor atau ilegal. Mulanya, para penambang ilegal mendekati salah satu warga Sumber Sari untuk meminta izin kepada Ketua RT 9 dengan alasan mau menggali batu untuk material bangunan. “Dia dekati warga saya, dia disuruh datang izin ke saya. Jadi penambang ilegal itu bukan langsung ke saya, nggak berani dia. Alasannya, mau masuk bawa alat untuk gali batu buat material bangunan itu saja. Kalau gali batu saya izinkan saja,” jelas Legimin.

Namun tanpa disangka oleh Legimin, seminggu setelahnya ada laporan dari warga yang lain bahwa ada aktivitas pertambangan batu bara yang lokasinya tak jauh dari wisata air terjun. Mendengar kabar tersebut Legimin langsung datang ke Lokasi dan memberhentikan aktivitas tersebut. “Saya datang ke lokasi itu dan saya stop operatornya. Saya tanya, ini mau digali batunya atau batu baranya, dijawab batu baranya. Terus saya minta stop jangan digali lagi,” ucap legimin. Namun, satu minggu kemudian penambang ilegal tersebut berpindah lokasi ke lahan di atasnya lagi bahkan sudah meloloskan 3 truk yang berisi batu bara. Mengetahui hal tersebut memancing kemarahan warga sehingga mereka melakukan aksi penutupan jalan.

“Selang satu minggu setelah saya suruh stop kemarin, mereka pindah lokasi ke lahan atas dan ternyata mereka sudah sempat bawa 3 truk,” ujar legimin. Aksi pengadangan jalan yang dilakukan warga merupakan kemauan dari warga sendiri untuk melindungi desa mereka dari aktivitas penambangan. “Suamiku ikut demo waktu aksi penutupan jalan tambang waktu itu, aku diinfo sama suami katanya mau ikut demo sama warga yang lain. Sayangnya aku nggak bisa ikut karena kebetulan lagi kerja juga,” ujar Umi yang bekerja sebagai buruh tani harian.

Begitu juga yang dirasakan oleh Dewi (39 tahun), warga RT 9, salah seorang warga yang suaminya juga ikut serta dalam aksi tersebut. Ia sempat merasakan ketakutan tersendiri sebab menurutnya yang dilawan warga bukanlah orang sembarangan dan memiliki kuasa yang kuat. Bahkan secara terang-terangan aparat keamanan memihak kepada penambang ilegal tersebut. Namun, sebagai bentuk kepeduliannya kepada warga yang lain serta untuk melindungi desa, ia mengizinkan suaminya untuk membantu warga Sumber Sari.

“Sebenarnya saya nggak izinin suami untuk ikut aksi penolakan tambang. Takutnya aneh-aneh karena musuhnya kan preman yang bawa senjata, belum lagi yang backup mereka orang kuat. Tapi ya juga kasihan teman-teman yang lain kalau nggak ikut. Jadi ya ini sebagai rasa peduli kita sebagai warga Sumber Sari. Karena dampaknya nanti pasti yang kena kita bersama,” terang Dewi.

Parmin pun menambah kesaksian tentang dirinya saat ikut aksi penolakan yang dilakukan warga kala itu. Ia mengatakan bahwa sempat berdebat dengan aparat kepolisian yang tidak memihak kepada warga. “Senang aku kalau berhadapan sama polisi. Aku nggak takut. Aku bilang di depan mukanya, masih kurang gajinya jadi polisi? Kalau kurang sini biar aku bantu usulkan gajimu ke Jakarta,” Cerita Parmin menggebu-gebu.



Gambar 42: Aksi warga menggeruduk lokasi tambang ilegal di Hulu Sungai Pelai, Desa Sumber Sari, Agustus 2022

Warga yang mayoritas tergabung sebagai kelompok tani desa sumber sari tersebut membuat petisi penolakan dan ditandatangani langsung oleh mereka. Bahkan kelompok Tani dari luar Sumber Sari ada yang ikut serta menandatangani petisi tersebut.

“Salah satu kekuatan kita itu juga ada di kelompok tani. Jadi di kelompok tani itu kita bersolidaritas untuk menolak aktivitas tambang batu bara di sini. Ada yang dari Bukit Biru, Panoragan Semuanya ikut tanda tangan menolak tambang,” jelas Legimin.

Tak sampai di situ, perjuangan masyarakat Sumber Sari masih berlanjut bersama Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim melaporkan kegiatan penambangan ilegal ke pihak berwenang pada 21 November 2022, tetapi tidak diindahkan. Pada 15 Desember 2022, JATAM Kaltim kembali menagih Surat Permintaan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara atau SP2HP kepada Kapolri, Direktorat Jenderal Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dan Kapolda Kalimantan Timur.

“Kami sebagai warga desa Sumber Sari bersyukur sekali bisa dibantu oleh teman-teman JATAM untuk meneruskan laporan kami sampai ke Mabes Polri, karena selama ini aktivitas penambangan ilegal itu dibiarkan begitu saja oleh pihak yang berwajib,” ujar Dedy.



TENTANG READERSBLOG HUTAN HUJAN FOTO PARA PENJAGA HUTAN

Untuk mencari, ketik dan tekan

Energi

Bareskrim Amankan Belasan Pekerja Tambang Batubara Ilegal di Lao Kulu, Jatam: Kejar Pemiliknya

oleh Abdallah Naem [Kutai Kartanegara] di 25 May 2023



Gambar 43: Bareskrim amankan belasan tambang batu bara ilegal di Lao Kulu.
Sumber: Mongabay

Akhirnya, pada 20 Mei 2023 Tim Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap 15 orang yang sedang beroperasi di lokasi. Pada saat itu, pihak keamanan mengamankan dua ekskavator serta dua tandon bahan bakar minyak jenis solar sebagai barang bukti. Sebelumnya, kepercayaan Masyarakat kepada pemerintah dan pihak berwajib mulai berkurang.

Hal ini dikarenakan beberapa kali warga melaporkan terkait penambangan ilegal tersebut, tetapi tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum. Bahkan, warga juga sempat meminta bantuan kepada anggota DPRD Kutai Kartanegara, tetapi dengan hasil yang mengecewakan. “Saya pernah minta bantuan ke anggota DPRD yang datang ke Sumber Sari, tapi beliau katanya nggak berani. Karena yang *backup* tambang ilegal ini orang berpangkat semua,” jelas Legimin. Selain itu, Legimin melanjutkan, “Sempat juga kita melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), tapi kita malah ditanya mau ganti rugi berapa sama Pak Dewan, Ahmad Yani. Saya kesal dan kecewa, pas pulang nggak saya salimi beliau. Bukannya membantu malah kita yang disuruh mengalah.”

Hingga saat ini, para penambang ilegal masih belum jera melakukan aktivitasnya di sekitar Sumber Sari. Pada Maret 2024 kembali ditemukan pengangkutan batu bara yang sering berlalu lalang di Desa Sumber Sari. Warga sempat menangkap basah kendaraan yang mengangkut batu bara tersebut dengan menggunakan mobil L300 dengan beban yang diangkat kurang lebih 2,5 ton. Menurut kesaksian dari Legimin, batu bara yang diambil menggunakan pickup adalah sisa-sisa penggalian batu bara sebelumnya.

Pada 28 Juni 2024, Warga Desa Sumber Sari bersama JATAM Kaltim bertemu dengan Pejabat Sementara Gubernur Kaltim, Akmal Malik di Samarinda. Warga dan JATAM Kaltim melaporkan ancaman tambang PT BMS dan tambang koridor (ilegal) di sana. Gubernur saat itu juga didampingi oleh Asisten-asistennya mulai dari asisten biro hukum dan asisten perekonomian dan administrasi pembangunan.

Perwakilan warga yang hadir mulai dari Kepala Dusun dan juga Ketua Pokdarwis Dedy, Ketua RT 9, Legimin dan Kepala Desa Sumber Sari Sutarno, mereka secara langsung menyerahkan kumpulan petisi dan tanda-tangan warga menolak kehadiran dan rencana Tambang PT BMS dan Tambang ilegal. Warga mendesak agar Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT BMS dicabut dan praktik pertambangan koridor/ilegal diberantas oleh pemerintah provinsi dengan segera mungkin.



Gambar 44: Audiensi Jatim, warga Sumber Sari bersama PJ Gubernur Kaltim, melaporkan ancaman tambang batu bara ilegal dan desakan pencabutan IUP PT. BMS



6. Tantangan dan Alternatif yang Berkeadilan dan Berdaya Puluhan

6.1 Tantangan Dampak Kesehatan Pertanian Intensif dan Ekonomi Wisata Massal

Pertanian memang menjadi argumen untuk menangkis kehadiran tambang. Namun di sisi lain, pertanian intensif yang melibatkan pupuk dan obat-obatan kimia yang diperkenalkan oleh rezim pertanian saat orde baru melalui program revolusi hijau juga menyimpan masalah dan punya bom waktunya sendiri. Mulai dari ketergantungan pupuk kimia dengan pemakaian pestisida yang berlebihan hingga dampak berbahaya dalam jangka panjang pada kesehatan lingkungan melalui ancaman terhadap kondisi kesehatan tanah dan kesehatan air.

Warga yang sebelumnya tidak menggunakan pupuk kimia sekarang banyak yang beralih menggunakan pupuk dan obat-obatan kimia. Bahkan, bila tidak menggunakan pupuk kimia warga merasa pertumbuhan tanamannya menjadi lambat dan sering kali banyak diserang hama.

Ketergantungan terhadap pupuk kimia ini sangat dirasakan oleh Sukanto warga RT 09, petani Desa Sumber Sari. Keluarga Sukanto dari tahun 2000-an menanam sayur, dan sejak awal sudah menggunakan pupuk kimia. Istrinya, Wijianti ikut menjelaskan jika tidak menggunakan pupuk kimia maka sayuran lambat tumbuh dan lebih mudah terserang penyakit akibat hama. Ibarat buah simalakama, apa boleh buat, Sukanto harus terus menggunakan obat kimia jika ingin tanamannya tumbuh cepat dan bebas hama sehingga dapat dijual untuk cepat pula menghasilkan uang.

Menurut Sukanto, ketergantungan penggunaan obat dan juga pupuk pada tanaman juga makin besar karena banyaknya jenis hama yang berbeda-beda pula obat kimia dan pestisida yang digunakannya. Terlebih lagi ketika telah memasuki musim hujan, Sukanto sering kali gagal panen akibat banjir atau hama seperti ulat yang menyerang sayuran dan pada ujungnya penyebab turunnya pendapatan karena tidak dapat menjual hasil pertanian ke pasar..

Ketergantungan juga muncul dengan semakin bergantungnya petani pada berbagai varian dan rupa macam jenis pupuk kimia dan obat-obatan. Makin banyak pengeluaran karena harus membeli banyak varian jenis pupuk dan obat-obatan kimia tersebut.

“Yang susah itu obat pestisida dan pupuk. Contohnya sayur sawi beda ulat beda juga jenis obat-obat yang dipakai. Sebenarnya kalau pertanian itu nggak boleh pakai kimia, tapi kita juga yang rugi. Karena kalau dibawa ke pasar banyak rusaknya karena ulat, ya nggak laku. Padahal kita juga banyak kebutuhan yang lain, belum lagi biaya anak sekolah,” ungkap Wijianti. Pertanian Intensif memang terintegrasi untuk memasok kebutuhan pasar yang besar demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka yang juga makin tinggi. Karena itu, mau tak mau harus ada yang dipilih. Bom waktu yang mengikuti penggunaan obat kimia dan pupuk pestisida secara terus-menerus dan jangka panjang ini akan berpengaruh negatif pada lingkungan, khususnya bagi tanah, unsur hara dan kualitas air tanah. Rata-rata para petani Sumber Sari memanfaatkan air sumur untuk digunakan keperluan konsumsi dan irigasi pertanian.

Dalam praktik, mereka menggunakan pestisida untuk melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Namun, beberapa pestisida yang mengandung logam berat, seperti timbal (Pb), dapat mencemari sumber air. Logam berat seperti timbal memiliki potensi untuk menyebabkan efek toksik jangka panjang terhadap kesehatan manusia, termasuk gangguan pada sistem saraf dan kerusakan pada organ-organ vital dalam tubuh.

Kadar timbal yang tinggi di air sumur dapat mempengaruhi kadar timbal dalam tanaman, berkisar antara 0,5-3,0 ppm, yang disebabkan oleh residu penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida dapat meningkatkan kadar logam dan bahkan menyebabkan keracunan.⁵⁸ Diketahui pula bahwa pupuk dan pestisida yang mengandung logam timbal (Pb) dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan secara terus-menerus pupuk dan pestisida dapat menyebabkan polutan pada tanah. Selain itu, penggunaan pupuk anorganik jenis fosfat juga memiliki dampak negatif yang dapat menurunkan produktivitas lahan pertanian jika digunakan dalam jangka waktu yang lama.

Penggunaan pestisida dalam pertanian dapat meninggalkan residu di dalam tanaman yang terlibat. Bahkan, beberapa jenis pestisida masih dapat terdeteksi dalam produk pertanian, baik selama proses pengolahan maupun saat produk tersebut dikonsumsi. Jumlah residu pestisida yang tersisa dalam produk pertanian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk dosis dan frekuensi penggunaan

⁵⁸Sudarmanto, H., Farpina, E., & Kusumawati, N. (2023). Analisis Kadar Timbal pada Air Sumur Petani di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 4(3), 3463-3472. hal 2

pestisida, kondisi lingkungan fisik yang mempengaruhi degradasi pestisida, jenis tanaman yang diobati, formulasi dan teknik aplikasi pestisida, serta sifat dan ketahanan bahan aktif pestisida yang digunakan.⁵⁹

Karena itu, sangat penting untuk memperhatikan residu pestisida dalam produk pertanian. Tingkat residu tidak hanya mempengaruhi kuantitasnya, tetapi juga dapat memiliki dampak jangka panjang. Demi menjaga keamanan konsumen, telah ditetapkan batas residu aman untuk setiap jenis pestisida pada berbagai jenis hasil pertanian yang akan dikonsumsi. Jika pupuk dan pestisida digunakan secara berlebihan dan terus-menerus, hal tersebut bisa menyebabkan peningkatan konsentrasi timbal (Pb) dalam tanah. Selanjutnya, logam berat timbal (Pb) dapat diserap oleh tanah dan menumpuk dalam jaringan tanaman melalui akar. Akhirnya, timbal (Pb) tersebut dapat masuk ke dalam rantai makanan.⁶⁰

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sudarmanto, H., Farpina, E., & Kusumawati, N. pada 2023 dengan judul “Analisis Kadar Timbal Pada Air Sumur Petani di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu” menunjukkan bahwa hasil pengukuran kadar timbal menggunakan spektrofotometer serapan atom pada 10 air sumur di Desa Sumber Sari memiliki nilai yang bervariasi dengan rentang antara 0,0074 mg/L hingga 0,0866 mg/L. Batas maksimum kadar timbal dalam air bersih sebesar 0,05 mg/L. Ditemukan 70% dari air sumur memenuhi standar baku mutu tersebut, sementara 30% tidak memenuhi standar.⁶¹ Karena itu, warga harus mulai menyadari dan membatasi penggunaan pupuk dan obat kimia agar dapat menjaga keberlanjutan pertanian untuk masa depan anak dan cucu mereka.

Ketergantungan terhadap bahan kimia akhirnya membuat petani juga dibebani dengan tenaga dan pengeluaran tambahan mencari sumber air baru. Bahkan, petani terjebak dengan terus menambah dosis penggunaan pupuk kimia seperti pestisida yang pada akhirnya memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan.

Selain kadar Timbal, juga ditemukan indikasi kadar Arsen. Penelitian serupa yang dipublikasikan pada Januari 2024 menyatakan bahwa juga ditemukan 2 sampel dari 10 sampel yang diambil pada sumur-sumur air Desa Sumber Sari terungkap mengandung kadar Arsen antara 0,0020 hingga 0,0080 mg/L. Meskipun masih

⁵⁹Ibid., Hal 5

⁶⁰Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) dalam Residu Pestisida pada Tanah, Air dan Bawang Merah di Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang, Andi Ruhban, Kurniawati, volume 17, 2017. hal. 2

⁶¹op.cit. hlm 6

di bawah ambang batas, tetapi kedua indikasi ini berdampak pada ancaman tak terlihat pada kesehatan manusia.⁶²

Namun, masalah ini tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada petani, tetapi juga karena kebijakan pemerintah yang kontradiktif. Seperti yang dijelaskan oleh Adi, ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di Desa Sumber Sari. Ia dan kelompok tani lainnya mendapatkan imbauan untuk mengurangi penggunaan pupuk subsidi dari Kementerian, tetapi petani juga dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan hal itu sangat bertolak belakang.

“Bupati menginginkan tingkat produktivitas petani padi yang ada di Sumber Sari disamakan dengan di Jawa yang dalam setahun bisa 3 kali panen. Padahal, struktur tanah di sini itu berbeda dengan di Jawa. Kalau di Jawa itu habis ditanami padi langsung bisa ditanami tanaman hortikultura, sedangkan di sini tidak bisa karena zat asam tanahnya cukup tinggi. Namun, kalau mau mengurangi itu pelan-pelan tidak bisa langsung dikurangi sekaligus karena bisa menyebabkan penurunan hasil pertanian secara drastis,” ungkap adi.

6.2 Tantangan Dampak Ekonomi Wisata Massal

Tak hanya di urusan ekonomi pertanian, tantangan argumen alternatif melalui ekonomi wisata massal juga tidak kalah besarnya. Model pariwisata massal seperti ini adalah wisata yang cenderung melibatkan banyak orang, dikunjungi oleh ratusan pengunjung, dilakukan secara bersama-sama dalam suatu waktu dan beramai-ramai.⁶³ Banyak studi tentang dampak negatif pariwisata massal ini yang berakibat lenyapnya budaya lokal atau budaya setempat. Seiring dengan semakin banyaknya pengunjung wisata yang berbondong-bondong ke suatu destinasi, budaya lokal akan menjadi homogen. Selain itu, tradisi dan cara hidup yang unik akan hilang. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya identitas masyarakat lokal.

Tidak hanya, itu, pariwisata massal juga berdampak terhadap lapangan pekerjaan. Meskipun pariwisata dapat menciptakan lapangan pekerjaan di industri perhotelan dan jasa, pariwisata massal juga dapat menyebabkan penurunan di ekonomi tradisional. Misalnya, di beberapa daerah, pertanian dan perikanan

⁶² Analisis Kadar Arsen pada Air Sumur Petani di Desa Summersari, Kecamatan Loa Kulu, *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan*, Vol 14, No 27, Januari 2024, Agnes Sri Yuniarti Siringgoringo et al

⁶³<https://www.masterplandesia.com/wisata/desa-wisata-menjawab-tren-wisata-alternatif/> diakses pada tanggal 11 Juni 2023

telah digantikan oleh pariwisata massal yang menyebabkan anjloknya lapangan pekerjaan tradisional berpindah untuk melayani ekonomi wisata massal.

Masyarakat setempat dalam pariwisata massal dapat terusir akibat konversi lahan pertanian untuk pembangunan prasarana pariwisata yang tidak terkendali. Rumah-rumah asli penduduk dan bangunan yang bernilai sejarah berkurang keasliannya karena terlalu menekankan aspek komersial. Pariwisata massal juga menyebabkan peningkatan tindak kejahatan atau munculnya perilaku yang bertentangan dengan norma adat setempat. Nilai-nilai asli kesenian maupun upacara tradisional akan berkurang keasliannya karena perubahan orientasi yang cenderung komersial.⁶⁴

Laju pembangunan infrastruktur juga dapat berdampak negatif karena pariwisata massal. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah, permintaan akan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, bandara, dan hotel pun meningkat. Hal ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas, dan tekanan pada sumber daya lokal.⁶⁵

Bisnis lokal juga dapat terdampak oleh pariwisata massal. Sementara beberapa bisnis mungkin diuntungkan oleh meningkatnya pariwisata. Pemodal sebagai pendatang didukung oleh regulasi pariwisata yang marak kemudian mentransformasi ruang dari kawasan permukiman menjadi area dengan dominasi akomodasi pariwisata: perhotelan dan penginapan. Dengan demikian, hal ini berdampak pada penurunan bisnis lokal, hilangnya keragaman ekonomi, kelangkaan lahan untuk hunian, dan harga tanah yang mahal.⁶⁶

Masalah lain adalah gentrifikasi yang dapat muncul akibat pariwisata massal. Dalam konteks ini, banyaknya pendatang menyebabkan perubahan sosial ekonomi yang mencakup tingginya harga properti hingga perubahan struktur masyarakat. Hasilnya, muncul berbagai hunian atau fasilitas baru guna memenuhi kebutuhan pendatang itu sendiri yang akhirnya warga lokal menghadapi kesenjangan sosial dan ekonomi serta ancaman relokasi maupun kesulitan mengakses barang privat serta publik.⁶⁷

⁶⁴ Muhammad Syafri “Dampak Wisata Pengembangan Parawisata Alam Terhadap Masyarakat Sekitar”, Hal 15

⁶⁵ Amrozi, I., Sultansyah, D. R. P., Hidayat, A. M. N. A., & Savirani, A. (2021). Kelompok milenial dan tantangan pembangunan kota: Gentrifikasi dan komersialisasi ruang di kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemuda*, 10(2), 115-130. diakses melalui <https://shorturl.at/xMnvH>

⁶⁶ *ibid.*, 128

⁶⁷ *ibid.*, 118

Pariwisata massal juga menjadi perhatian yang berkembang di banyak destinasi wisata populer. Ketika jumlah wisatawan yang mengunjungi destinasi melebihi daya tampung wilayah, hal ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk, kerusakan lingkungan, dan penurunan kualitas hidup penduduk setempat. Akibat ketidakmampuan mengendalikan perilaku para pengunjung karena kepadatannya, pengalaman kerusakan serupa ini pernah terjadi di Desa Sumber Sari pada 2014. Kejadian tersebut diduga akibat perilaku sejumlah pengunjung hingga terjadi kebakaran lahan dan hutan di sekitar wilayah wisata.

Jelas ekonomi tambang bukanlah pilihan, tetapi alternatif atau ekonomi tandingan apa yang patut dipertimbangkan oleh segenap pengurus Desa Sumber Sari dan warganya? Jika ekonomi pertanian dan ekowisata adalah alternatif yang dipilih, maka model ekonomi pertanian dan ekowisata semacam apa yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan sejak sekarang demi masa depan Desa Sumber Sari kelak.



Gambar 45:Kebakaran lahan di wilayah wisata Bukit Biru akibat api dari wisatawan yang berkunjung, Oktober 2014

6.3 Desakan pada Pemerintah, Menuju Desa Berkeadilan dan Berdaya Pulih

Pertambangan bukanlah solusi bagi warga Desa Sumber Sari dan Merangan. Sebaliknya pertambangan hanya memunculkan masalah baru yang mengganggu wilayah produksi pertanian dan perikanan. Pertambangan mencemari sumber air milik warga dan merusak jalan- jalan umum yang digunakan warga untuk mengirim hasil pertanian mereka kepada konsumen atau sebagai perputaran ekonomi warga.

Hasil pertanian yang menjadi lumbung pangan dan objek wisata edukasi yang dimiliki Desa Sumber Sari memiliki potensi yang lebih besar dan dapat berkembang secara berkelanjutan jika dibandingkan dengan sektor pertambangan.

Desakan

Jatam Kaltim mendesak untuk melakukan pencabutan izin, audit, evaluasi, pemberian sanksi, penegakan hukum, dan pemulihan di antaranya:

1. Kepada Pemerintah

- a. Mendesak Menteri, Gubernur, Bupati sesuai kewenangannya menindaklanjuti hasil temuan laporan ini dengan menyusun rencana perlindungan, pengelolaan, pengendalian, pencegahan, penanggulangan, pemulihan mutu air dan pencemaran air Sungai Pelai akibat aktivitas pertambangan batu bara ilegal sesuai Pasal 124,127, dan 128 PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah sesuai kewenangannya juga mesti segera mencabut izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan hidup (AMDAL) PT Borneo Mitra Sejahtera (BMS)
- b. Mendesak pemerintah untuk segera melakukan pemulihan lingkungan di hulu Sungai Pelai yang diduga mengalami pencemaran akibat adanya aktivitas pertambangan batu bara ilegal yang berada tepat di hulu sungai. Aktivitas tersebut menyebabkan kerugian bagi warga Desa Sumber Sari yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani dan pembudidaya bibit ikan yang semua sumber airnya bergantung pada aliran Sungai Pelai.

- c. Mendesak Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian ESDM selaku pemberi izin, untuk mencabut Izin PT BMS yang telah berlaku sejak 2020 hingga 2030, karena telah melanggar Undang-undang No. 41 Tahun 2009 Tentang Pertanian dan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Desa Sumber Sari sendiri merupakan Kawasan pertanian komoditas padi di Kabupaten Kutai Kartanegara, selain kawasan pertanian komoditas padi, Desa Sumber Sari juga ditetapkan sebagai Desa Wisata sesuai dengan SK Bupati Kutai Kartanegara Nomor 602/SK-BUP/HK/2013.
- d. Mendesak Dinas Perikanan, Pertanian, dan Pariwisata baik Provinsi maupun Kabupaten untuk melakukan perlindungan terhadap lahan perikanan budidaya, lahan pertanian, dan kawasan pariwisata dari ancaman pertambangan legal maupun ilegal di Desa Sumber Sari. Agar cita-cita serta tujuan menjadi desa lumbung pangan dan kawasan destinasi wisata dapat terjaga dan tercapai.

2. Kepada Penegak Hukum

- a. Mendesak Polri, Polda Kaltim, dan Polres Kukar untuk melakukan tindakan terhadap pelaku *Illegal Mining* atau pertambangan ilegal. Pertambangan Tanpa Izin melanggar pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.
- b. Mendesak aparat penegak hukum untuk dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam memperjuangkan lingkungannya baik dari ancaman maupun kriminalisasi sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perlindungan Hukum Terhadap Orang yang Memperjuangkan Hak Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat.

Harapan dan Mimpi untuk Masa Depan Desa Sumber Sari

Pemerintah dan negara harus lebih memperhatikan petani, terlebih pupuk subsidi dan harga jual pasar karena warga sering kali mendapatkan bantuan pupuk yang rusak. Pupuk jadi hal yang krusial karena sangat mempengaruhi hasil pertanian. Warga sangat bergantung dengan pupuk penyubur tanah agar dapat mendukung hasil pertanian sehingga pendapatan serta kesejahteraan petani di Desa Sumber Sari dapat meningkat. Pemerintah dituntut berdiskusi dengan warga dan mencari

jalan tengah terbaik dan mempertimbangkan berbagai alternatif seperti pupuk non kimia seperti pupuk organik subsidi demi masa depan pertanian berkelanjutan Desa Sumber Sari.

Selain itu, warga berharap tidak ada tambang yang masuk ke Desa Sumber Sari. Keberadaan tambang sangat berpengaruh, dampaknya sangat dirasakan warga. Seperti perubahan warna air di beberapa sumber mata air yang digunakan warga untuk sawah dan kebunnya. Pencemaran air ini semakin dirasakan saat banyaknya ikan yang mati saat menggunakan air tersebut. Apabila tambang memasuki desa, warga dan keragaman hayati sekitar hanya akan mendapatkan kerugian atas dirusaknya lahan kehidupan mereka.

Daftar Wawancara

1. Dariminin (54 tahun) petani dan ketua RT 02
2. Sandi (73 Tahun)
3. Legimin (52 Tahun)
4. Dedi
5. Saleh Aris (72 Tahun)
6. Sibbo (81 Tahun)
7. Supini (74 Tahun)
8. Kris Nugroho (54 Tahun)
9. Suparni (73 Tahun)
10. Parmin
11. Sukanto
12. Wijianti
13. Kris Nugroho (54 Tahun)
14. Umi dan Winarti (44 Tahun)
15. Rendy (22 tahun)
16. Ardiansyah (35 tahun)
17. Yanto (41 tahun)
18. Supono (45 Tahun)
19. Afid 42 (Tahun)
20. Suparnowo
21. Suparni (73 Tahun)
22. Kris (54 tahun)
23. Suprpto
24. Jumini (46 Tahun)
25. Suhartini (48 Tahun)
26. Dewi (39 tahun)
27. Bu Wijianto (istri pak sukanto)
28. Bu Umi dan Bu Winarti (44 Tahun) seorang buruh harian

Sumber Rujukan dan Pustaka

Undang-Undang dan Dokumen Laporan

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses 13 Agustus 2024. <https://jdih.go.id/pencarian/detail/1325571/undang-undang-nomor-32-tahun-2004-tentang-pemerintahan-daerah>.

“Otonomi Daerah: Pengertian, Sejarah, Tujuan, Asas dan Prinsip.” Diakses 13 Agustus 2024. https://wawasankebangsaan.id/otonomi-daerah/#google_vignette.

“TUKS Ilegal Jadi Tempat Penumpukan Batu Bara di Jonggon, KSOP Samarinda Tidak Punya Wewenang Lakukan Penindakan.” Jurnal Borneo. Diakses 2 Juni 2024.

Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan PT BMS Halman II-12. Presentasi PowerPoint, Wisata Alam dan Pendidikan, Pokdarwis Dewi Arum, diperoleh April 2024.

Salinan Berita Acara Pengambilan Foto dan Video Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Halaman 4.

Salinan Berita Acara Verifikasi Pengaduan Gakkum KLHK. 2022. Desember 15. Sumber Arsip JATAM Kaltim.

Surat Tugas Khusus PT BMS No. 038/SEK-KD/KK/IV/2012.

Buku dan Laporan Penelitian

Amrozi, I., Sultansyah, D. R. P., Hidayat, A. M. N. A., & Savirani, A. 2021. “Kelompok Milenial dan Tantangan Pembangunan Kota: Gentrifikasi dan Komersialisasi Ruang di Kota Yogyakarta.” Jurnal Studi Pemuda 10 (2): 115-130.

Azzahra, Jihan Nasywa, Tegar Warap Prada Khoiri, Mei Candra Ayu Puspita, Eko Ribawati. 2024. “Revolusi Hijau Masa Orde Baru.” Vol. 5 Tahun 2024.

- Cendikia Pendidikan, Sindoro. "Revolusi Hijau Masa Orde Baru," Jihan Nasywa Azahra, Tegar Waraprada Khoiri, Mei Candra Ayu Puspita, Eko Ribwati, Vol. 5, Halaman 5.
- Cendikia Pendidikan, Sindoro. "Revolusi Hijau Masa Orde Baru," Jihan Nasywa Azahra, Tegar Waraprada Khoiri, Mei Candra Ayu Puspita, Eko Ribwati, Vol. 5, Halaman 5.
- Kamil, A. A., Ahyat, I. S., Sunarti, L., Setiawan, A., & Ismiyani, T. 2016. *Pertambangan Batubara di Kutai, Kalimantan Timur: Dampak terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Kutai 1860-1926 = Coal Mining in Kutai East Kalimantan Impact on Social and Economic Life Kutai Society 1860-1926*. Tesis, Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia. Diakses melalui <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431873&lokasi=lokal>.
- Muamaroh, Lailatul. "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (BIMAS) Padi Di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998." Vol 5, Halaman 458.
- Muamaroh, Lailatul. "Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (BIMAS) Padi Di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984-1998." Vol 5, Halaman 458.
- Noo, Muhammad Fauzan, Dini Zulfiani. 2021. "Analisa Potensi Wisata pada Desa Wisata Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara." *Jurnal Darmawisata* 1 (1).
- Nugroho, Wahyudi. "Konstruksi Sosial Revolusi Hijau Di Era Orde Baru," hal. 55, Vol. 12.
- Ruhban, Andi, Kurniawati. 2017. "Kandungan Logam Berat Timbal (Pb) Dalam Residu Pestisida Pada Tanah, Air Dan Bawang Merah Di Desa Salu Dewata Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang." *Jurnal Sulolipu: Media Komunikasi Sivitas Akademika dan Masyarakat* 17 (II): 2.
- Safri, Muhammad. 2020. "Dampak Wisata Pengembangan Pariwisata Alam Terhadap Masyarakat Sekitar." Jawa Tengah: CV. Pena Persada.
- Siringgoringo, Agnes Sri Yunyarti et al. 2024. "Analisis Kadar Arsen pada Air Sumur Petani di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu." *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan* 14 (27): Januari 2024.
- Siringgoringo, Agnes Sri Yunyarti et al. 2024. "Analisis Kadar Arsen Pada Air Sumur Petani di Desa Sumber Sari, Kecamatan Loa Kulu." *Jurnal Kesehatan dan Pembangunan*, Vol 14, No 27.

Sudarmanto, H., Farpina, E., & Kusumawati, N. 2023. "Analisis Kadar Timbal pada Air Sumur Petani di Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu." Jurnal Kesehatan Tambusai 4 (3): 3463-3472, hal. 2.

Supriyanto, H. 2019. Loa Kulu Dalam Catatan. Samarinda: RV Pustaka Horizon, 22.

Artikel Berita

BBC Indonesia. 2023. "Kasus Korupsi Terkait Tambang Ilegal di Indonesia." Diakses 8 Februari 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64583574>.

Detik. 2024. "KPK Syaukani Lakukan 3 Modus Korupsi di Kaltim." Diakses 13 Agustus 2024. <https://news.detik.com/berita/d-755424/kpk-syaukani-lakukan-3-modus-korupsi-di-kaltim>.

Kompas. 2023. "PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan dari Tambang Ilegal Buat Kampanye." Diakses 8 Februari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/14/22401131/ppatk-temukan-transaksi-mencurigakan-dari-tambang-ilegal-buat-kampanye>.

Mongabay. 2023. "Tambang Batubara Ilegal Masih Marak di Kalimantan Timur." Diakses 8 Februari 2024. <https://www.mongabay.co.id/2023/02/04/tambang-batubara-ilegal-masih-marak-di-kalimantan-timur/>.

Tempo. 2022. "Perlawanan dari Balik Bukit Biru." Diakses 8 Mei 2024. <https://rb.gy/xugvaq>.

Tempo. 2023. "61 Kepala Daerah Jadi Tersangka Korupsi Pada 2021-2023." Diakses 13 Agustus 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1865207/61-kepala-daerah-jadi-tersangka-korupsi-pada-2021-2023-icw-lingkarannya-sejak-sejak-awal>.

Tempo. 2024. "Profil Rita Widyasari Eks Bupati Kukar Ikuti Jejak Ayah Korupsi Hingga." Diakses 13 Agustus 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/09/08351521/profil-rita-widyasari-eks-bupati-kukar-ikuti-jejak-ayah-korupsi-hingga?page=all>.

Tirto.id. 2021. "Pemberontakan DI-TII Kahar Muzakar: Sejarah, Kronologi, Penumpasan." Diakses 5 Juni 2024. <https://tirto.id/pemberontakan-di-tii-kahar-muzakar-sejarah-kronologi-penumpasan-gaQ5>.

TribunKaltim. 2019. "5 Desa dan Satu Dusun di Kukar Ini Jadi Sasaran Program Kampung Iklim." Diakses 13 Juni 2024. <https://kaltim.tribunnews.com/2019/05/27/5-desa-dan-satu-dusun-di-kukar-ini-jadi-sasaran-program-kampung-iklim?page=1>.

Website dan Sumber Daring

- “Profil Desa Sumber Sari.” Diakses 13 Agustus 2024. <https://web.archive.org/web/20120501222920/http://humas.kutaiartanegarakab.go.id/read/news/2011/5956/tiga-desa-hasil-pemekaran-di-resmikan.html>.
- CGIAR. 2024. “Padi IR 64 Diproduksi pada Tahun 1985 yang Disebarkan Pertama Kali ke Filipina dan Beberapa Negara Asia Lainnya seperti Kamboja hingga Indonesia.” Diakses Februari 2024. <https://www.cgiar.org/innovations/ir64-the-worlds-mega-rice/>.
- Desa Sumber Sari. 2024. “Sejarah Desa Sumber Sari.” Diakses 14 Agustus 2024. <https://desasumbersari44.wordpress.com/sejarah-desa/>.
- JATAM. 2024. “Siapa Penguasa Tanah Kaltim?” Diakses 13 Agustus 2024. <https://jatam.org/id/lengkap/siapa-penguasa-tanah-kaltim>.
- Jurnal Borneo. 2023. “TUKS Ilegal Jadi Tempat Penumpukan Batu Bara di Jonggon, KSOP Samarinda Tidak Punya Wewenang Lakukan Penindakan.” Diakses 2 Juni 2024. <https://journalborneo.com>.
- Kaltim Kece. 2024. “Wisata Puncak Bukit Biru Tawarkan Keindahan Dari Ketinggian Hingga Air Terjun.” Diakses 23 Juni 2024. <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/wisata-puncak-bukit-biru-tawarkan-keindahan-dari-ketinggian-hingga-air-terjun>.
- KaltimKece. 2021. “Wisata Puncak Bukit Biru, Tawarkan Keindahan dari Ketinggian Hingga Air Terjun.” Diakses 23 Juni 2024. <https://kaltimkece.id/warta/kutai-kartanegara/wisata-puncak-bukit-biru-tawarkan-keindahan-dari-ketinggian-hingga-air-terjun>.
- Kukar Kab. 2024. “Bupati Kukar: Desa Sumber Sari Kecamatan Loa Kulu Pilot Project Pertanian Berbasis Kawasan di Kukar.” Diakses 13 Agustus 2024. <https://kukarkab.go.id/v2/berita/982/Bupati-Kukar-:-Desa-Sumber-Sari-Kecamatan-Loa-Kulu-Pilot-Project-Pertanian-Berbasis-Kawasan-di-Kukar>.
- Kukar Paper. “Perkuat Ekonomi, Kukar Fokus Pembangunan Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekraf.” Diakses 13 Agustus 2024. <https://kukarpaper.com/perkuat-ekonomi-kukar-fokus-pembangunan-berbasis-pertanian-pariwisata-dan-ekraf/>.
- KukarKab. 2023. “Sumber Sari Raih Gender Award.” Diakses 13 Juni 2024. <https://kukarkab.go.id/v2/berita/1186/Desa-Sumber-Sari-Raih-Gender-Award-2023>.

- Kutaikartanegara.com. 2021. "Desa Sumber Sari di Loa Kulu Ikut Lomba Kampung Tangguh Polda Kaltim." Diakses 13 Juni 2024. <https://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=7029>.
- Kutaikartanegara.com. 2024. "Kampung Tangguh Polres Kukar di Desa Sumber Sari Juara I Bakal Wakili Polda Kaltim di Tingkat Nasional." Diakses 13 Agustus 2024. <https://www.kutaikartanegaranews.com/2021/01/kampung-tangguh-polres-kukar-di-desa-sumber-sari-juara-i-bakal-wakili-polda-kaltim-di-tingkat-nasional.html>.
- Masterplandes.com. 2020. "Desa Wisata Menjawab Tren Wisata Alternatif." Diakses 11 Juni 2023. <https://www.masterplandes.com/wisata/desa-wisata-menjawab-tren-wisata-alternatif/>
- Okezone Travel. 2024. "7 Tempat Wisata Hits di Kutai Kartanegara, Pantai Eksotis Hingga Taman Lampu Warna-Warni." Diakses 16 Juni 2024. <https://travel.okezone.com/read/2024/01/15/408/2954827/tempat-wisata-hits-di-kutai-kartanegara-pantai-eksotis-hingga-taman-lampu-warna-warni?page=all>.
- Website Resmi BPS Kutai Kartanegara. Diakses 8 Juni 2024. <https://kukarkab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=Nzg2MDgzODA0NDI4MjZINjl4YmZkYjc5&xzmn=aHR0cHM6Ly9rdWthcmthYi5icHMuZ28uaWQvcH-VibGljYXRpb24vMjAxOS8wOS8yNi83ODYwODM4MDQ0MjgyNmU2M-jhiZmRiNzkva2VjYW1hdGFuLWxvYS1rdWx1LWRhbGFtLWFuZ2thLTlw-MTkuaHRtbA%3D%3D&twoadfnorfeauf=MjAyNC0wOC0xMyAxNjowN-DoxMQ%3D%3D>.
- Website Resmi Minerba One Data Indonesia (MODI). Diakses 13 Agustus 2024. <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/1510?jp=1>.

Tentang Penyusun:

Diah Pitaloka

Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Mulawarman dan Sambaliung Corner

Fhierly Shaqirah

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Anggota Sambaliung Corner

Mustari Sihombing

Anggota Divisi Produksi Pengetahuan Dan Penguatan Simpul Tapak Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur.

Windy Pranata

Anggota Divisi Data Base Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur

Tentang JATAM KALTIM

Jaringan Advokasi Tambang adalah jaringan organisasi non pemerintah (ornop) dan organisasi komunitas yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah HAM, gender, lingkungan hidup, masyarakat adat dan isu-isu keadilan sosial dalam industri pertambangan dan migas. Indonesia tidak hanya menanggung praktek pertambangan yang destruktif di atas tanah dan sumber daya alamnya. Tetapi juga telah memiliki daftar panjang menyedihkan tentang pelanggaran HAM termasuk penggusuran paksa, hilangnya sumber kehidupan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.

JATAM bekerja dengan masyarakat korban di banyak daerah di Indonesia yang dirusak oleh kegiatan pertambangan dan migas. Posisi dan tuntutan JATAM lahir dari keprihatinan terhadap penghancuran masif lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat setempat akibat industri pertambangan dan migas.

Untuk menjangkau JATAM Kaltim silahkan akses:

Facebook @JatamKaltimID

Instagram @jatamkaltim

Twitter @jatamkaltim

Website www.jatamkaltim.org



JARINGAN ADVOKASI TAMBANG
Kalimantan Timur

